



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 7 Telp (0293) 314663 Fax (0293) 361775
MAGELANG
56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NOMOR : 060 /~~2022~~/ 330 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, bahwa Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa telah dilakukan pendampingan penyusunan proses bisnis yang mengacu pada proses bisnis tingkat Kota maupun evaluasi dan perbaikan terhadap proses bisnis yang sudah ada sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG**
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis dalam penerapannya bersifat dinamis dan adaptif dalam rangka menjawab perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilakukan inovasi guna penyederhanaan dan pengintegrasian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Nomor Nomor 060/576/330 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Nomor 060/613/330 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Magelang Nomor 060/ 576/330/ Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG



KHUDHOIFAH

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NOMOR : 060 /2023/330 TAHUN 2023

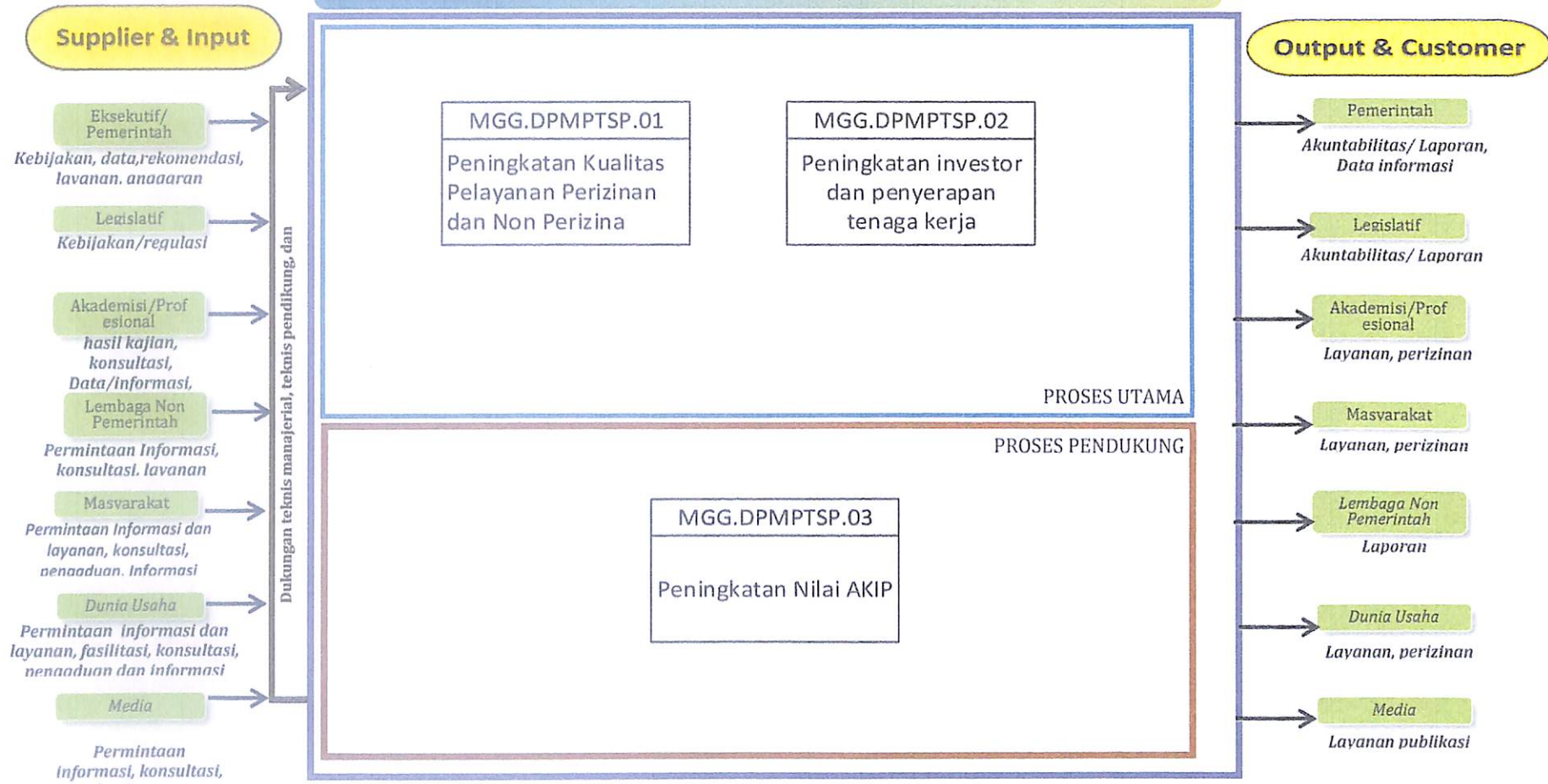
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

PROSES BISNIS DPMPTSP KOTA MAGELANG

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Identifikasi Kalimat Proses | Jenis Proses | Kode Proses | Identifikasi Kalimat Subproses | Kode Proses | Organisasi Terkait |
|----|--|---|--|---|--------------|-----------------|---|--------------------|--|
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif | Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah , cepat dan transparan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizina | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizina | Utama | MGG.DPMPT SP.01 | Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal | MGG.DPMPT SP.01.01 | BKPM, Kementerian PUPR , Kemenkes, Kementerian ATR, Kemenpan RB, Kemendagri, Kominfo, BPN, DPMPTSP Prov Jateng, Bapeda, Disperkim, Disdukcapil, DKK, UKPBJ, Disperindag, Dishub, DLH, DPUPR, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, BPKAD, Bagian Perekonomian, Bagian Organisasi, Dinsos, Disporapar, Disnaker, Kesbangpolinmas, Diskominsta, Dispertan, Bagian Hukum, Lembaga Non Pemerintah |
| | | | | | | | Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | MGG.DPMPT SP.01.01 | Diskominsta, DKK, BPKAD, Disperindag, Dishub, DLH, DPUPR, KPP Pratama, BPS, DP4KB, Kesbangpolinmas, , Lembaga Non Pemerintah |
| 2 | Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan | Meningkatnya Investasi | Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja | Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja | Utama | MGG. DPMPTSP.02 | Peningkatan Kepeminatan Investasi | MGG.DPMPT SP.02.01 | BKPM, DPRD, DPMPTSP Prov Jateng, Bapeda, Dispora, Disperindag, Disnaker BPKAD, DPUPR, BPS, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, |

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Identifikasi Kalimat Proses | Jenis Proses | Kode Proses | Identifikasi Kalimat Subproses | Kode Proses | Organisasi Terkait |
|----|--|--|-------------------------|---|--------------|-----------------|---|---|---|
| | Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan | | | | | | <p>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang Undangan</p> | <p>MGG.DPMPT SP.02.02</p> <p>MGG.DPMPT SP.02.03</p> | <p>Bagian Kemenhunkam Kanwil Jateng, Lembaga Non Pemerintah</p> <p>Kemenhunkam RI, DPRD, Disperindag, Bapeda, DPUPR, DLH, Disnaker, Dispora, Disperten, Dishub, Kemenkunham Kanwil Jateng, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, DPMPTSP Prov Jateng, Biro Hukum Prov Jateng, BKPM, DKK, BPS, BPKAD, Lembaga Non Pemerintah</p> <p>BKPM, DKK, Disperindag, DPUPR, Dishub, BPN, DLH, Disnaker, Dispora, Disperten, PDAM, BPKAD, DPMPTSP Prov Jateng</p> |
| 3 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD | Meningkatnya Nilai AKIP | Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Pendukung | MGG. DPMPTSP.03 | Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah | MGG.DPMPT SP.03.01 | BKPSDM, Bapeda, SETDA, BPKAD, SAMSAT, UKPBJ, DPRD, Inspektorat, Diskominsta, Disperpusip, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi, PLN, Telkom, PDAM, Kelurahan |

PETA PROSES (LEVEL 0) DPMPTSP KOTA MAGELANG



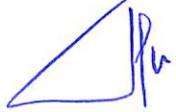
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

KHUDHOIFAH

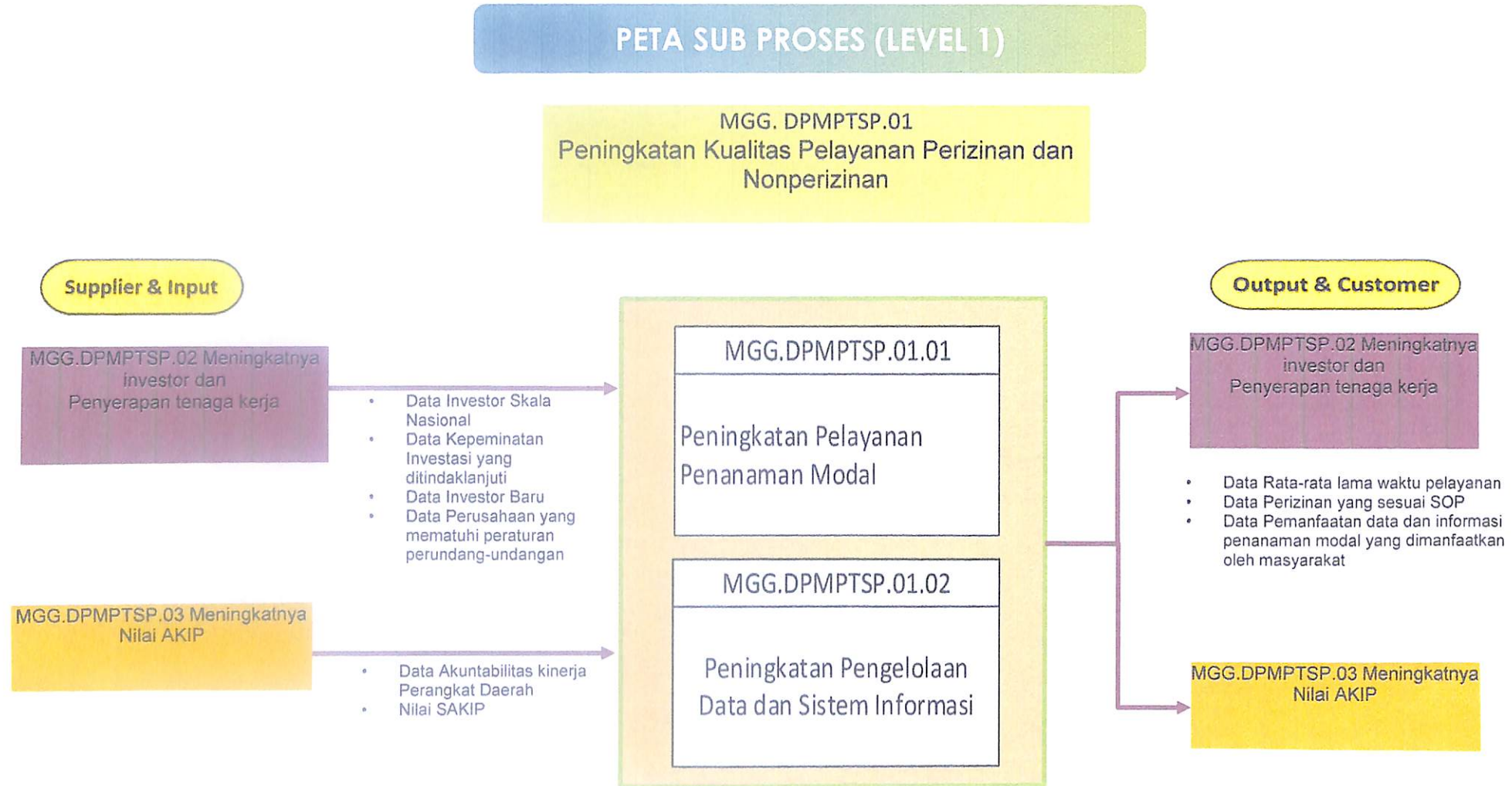
LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
 NOMOR : 060 /2025/ 330 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAGELANG


 KHUDHOIFAH

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
NOMOR : 060 /2095/330 TAHUN 2023
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG



PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

MGG. DPMPTSP.02
Meningkatnya Investor dan
Penyerapan tenaga kerja

Supplier & Input

MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan
Kualitas Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan

- Data Rata-rata lama waktu pelayanan
- Data Perizinan yang sesuai SOP
- Data Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan oleh masyarakat

MGG.DPMPTSP.03 Meningkatnya
Nilai AKIP

- Data Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- Nilai SAKIP



Output & Customer

MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan
Kualitas Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan

- Data Investor Skala Nasional
- Data Kepeminatan Investasi yang ditindaklanjuti
- Data Investor Baru
- Data Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan

MGG.DPMPTSP.03 Meningkatnya
Nilai AKIP

PETA SUB PROSES (LEVEL 1)

MGG. DPMPTSP.03
Meningkatnya
Nilai AKIP

Supplier & Input

MGG.DPMPTSP.01 Meningkatnya
investor dan
Penyerapan tenaga kerja

- Data Rata-rata lama waktu pelayanan
- Data Perizinan yang sesuai SOP
- Data Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan oleh masyarakat

MGG.DPMPTSP.02 Meningkatnya
investor dan
Penyerapan tenaga kerja

- Data Investor Skala Nasional
- Data Kepeminatan Investasi yang ditindaklanjuti
- Data Investor Baru
- Data Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan

MGG.DPMPTSP.03.01

Peningkatan Penunjang
urusan Perangkat Daerah

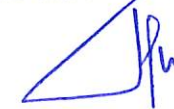
Output & Customer

MGG.DPMPTSP.01 Meningkatnya
investor dan
Penyerapan tenaga kerja

- Data Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- Nilai SAKIP

MGG.DPMPTSP.02
Meningkatnya
investor dan
Penyerapan tenaga kerja

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG



KHUDHOIFAH

LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NOMOR : 060 /2023 /330 TAHUN 2023

TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

IDENTIFIKASI PENTAS LINTAS FUNGSI

| Peta Sub Proses | Kode Peta Sub Proses | Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) | |
|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.01.01 | Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 | Pelaksanaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01 | Penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.01 | |
| | | | | | | Pelaksanaan Pelayanan Perizinan | | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02 |
| | | | | | | Pelaksanaan Penjaminan Mutu Layanan | | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.03 |
| | | | | Pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.02 | | | |
| | | | | Pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.03 | | | |

| Peta Sub Proses | Kode Peta Sub Proses | Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) |
|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Pelaksanaan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.04 | | |
| Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.01.02 | Pelaksanaan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi | MGG.DPMPTSP.01.02.CFM.01 | Pelaksanakan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | MGG.DPMPTSP.01.02.CFM.01.01 | | |
| Peningkatan Kepeminatan Investasi | MGG.DPMPTSP.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01.01 | | |
| | | | | Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01.02 | | |

| Peta Sub Proses | Kode Peta Sub Proses | Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Pengembangan Iklim Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.02.02 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.01.01 | | |
| | | | | Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Daerah | MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.01.02 | | |
| | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.02 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.02.01 | | |
| | | | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.02.02 | | |
| Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang Undangan | MGG.DPMPTSP.02.03 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01.01 | | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01.02 | | |

| Peta Sub Proses | Kode Peta Sub Proses | Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) |
|---|----------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01 | Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01.01 | | |
| | | | | Penyusunan Dokumen Anggaran | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01.02 | | |
| | | | | Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01.03 | | |
| | | Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02 | Pengelolaan Administrasi Keuangan | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02.01 | | |
| | | | | Pengelolaan Laporan Keuangan | MGG.DPMPTSP.03.02.CFM.02.02 | | |
| | | Peningkatan Administrasi Kepegawaian | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03 | Pengelolaan Administrasi Kehadiran Kepegawaian | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.01 | | |
| | | | | Peningkatan Kompetensi Pegawai | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02 | | |
| | | | | Pengelolaan Usulan Kenaikan/Penghentian Pegawai | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.03 | | |
| | | Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.04 | Pengelolaan Layanan Konsultasi/Perjalanan Dinas | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.04.01 | | |
| | | Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05 | Jasa Surat Menyurat | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05.01 | | |

| Peta Sub Proses | Kode Peta Sub Proses | Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 2) | Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 3) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) | Kode Peta Lintas Fungsi (Level 4) |
|-----------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.06 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.06.01 | | |

IDENTIFIKASI RINCIAN PETA LINTAS FUNGSI (LEVEL 2)

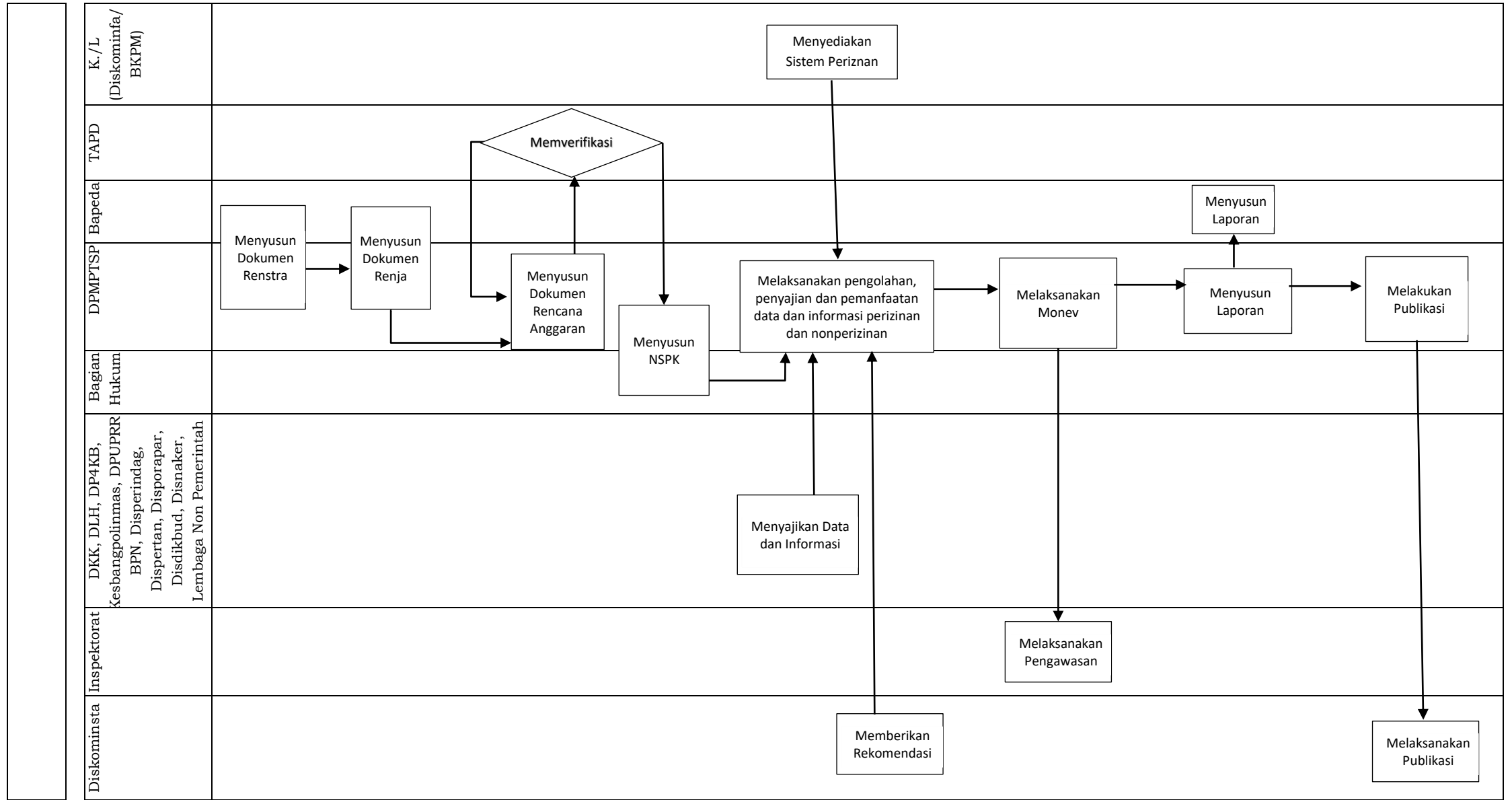
Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--|------------------------------------|---------|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | DPMPTSP |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Melaksanakan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | BKPM, Kementerian PUPR, Kemenkes, Kementerian ATR, DLH, KemenpanRB, Kemendagri, Kominfo, DPMPTSP Prov Jateng, DKK, Dishub, UKPBJ, Dispertan, BPN, Disperindag, Disporapar, Dinsos, BPKAD, Disdikbud, Disdukcapil, Disnaker, Disperkim, Bagian Organisasi, Kesbangpolinmas, Lembaga Non Pemerintah, DPUPR | SOP, SP Perizinan dan Nonperizinan | |
| 6 | Melaksanakan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal | DKK, Dishub, Dispertan, DLH, Disnaker, Disperindag, DPUPR, Disdikbud | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | |
| 7 | Melaksanakan pelayanan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal | BKPM, DPMPTSP Prov Jateng, DLH, Disnaker, BAPEDA, BPKAD, DPUPR, Disperindag, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Lembaga Non Pemerintah | SK Insentif/Fasilitas PM | |
| 8 | Melaksanakan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan | DKK, Dishub, Dispertan, DLH, Disnaker, Disperindag, DPUPR, BPKAD, Kesbangpolinmas, Disdikbud, Diskominsta | Laporan Pengaduan | |
| 9 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 10 | Menyusun Laporan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 11 | Melakukan Publikasi | DPMPTSP, BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi PM | |

Pelaksanaan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi

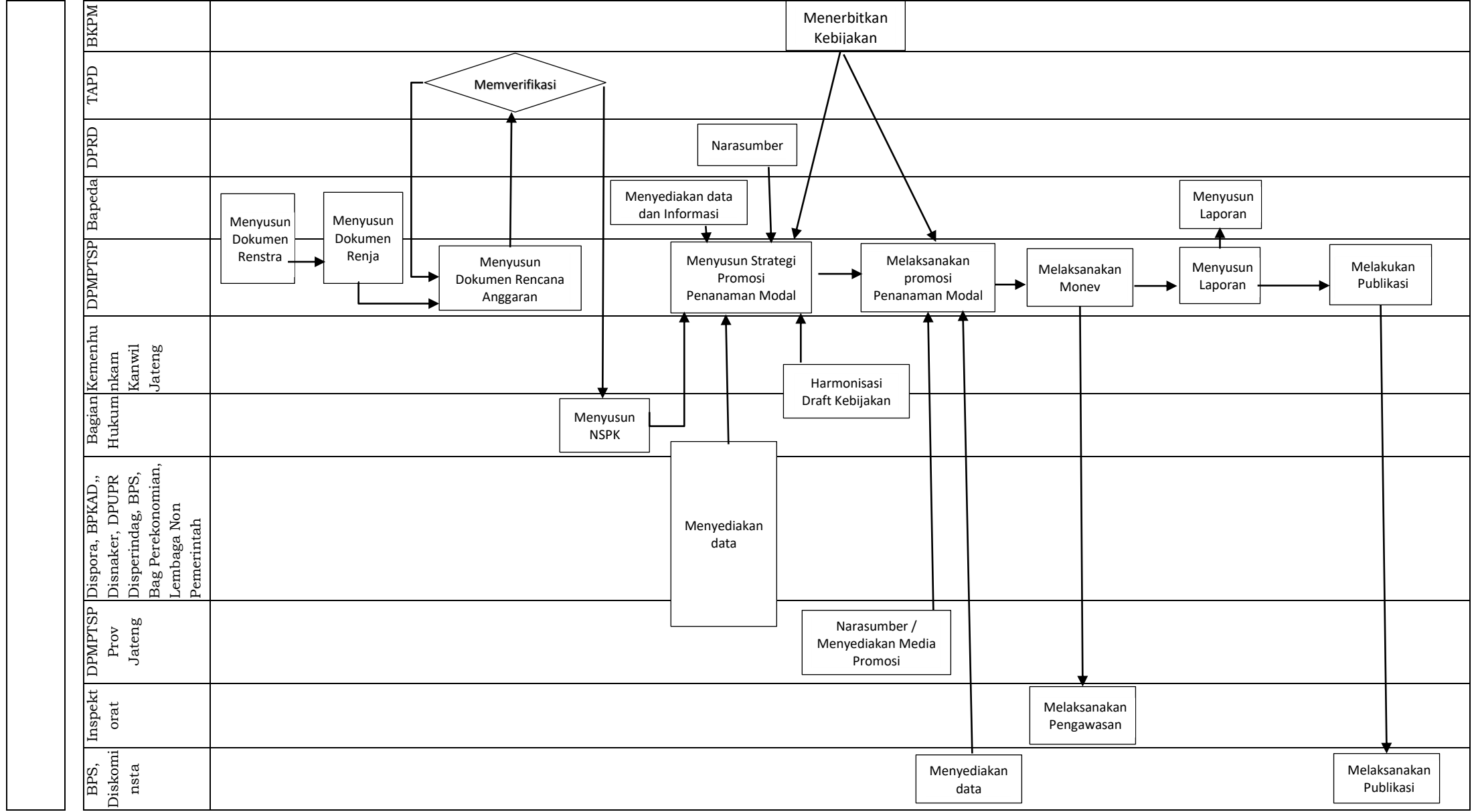
Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.02 Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.02.CFM.01 Pelaksanaan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|---|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Melaksanakan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Kominfo, BKPM, Diskominsta, DKK, DLH, Kesbangpolinmas, DPUPR, BPN, Disperindag, Dispertan, Disporapar, Disdikbud, Disnaker, DP4KB, Lembaga Non Pemerintah | Data, Informasi dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| 6 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 7 | Menyusun Laporan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 8 | Melakukan Publikasi | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |



Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.01 Peningkatan Kepeminatan Investasi
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--|---|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal | BKPM, DPRD, DPMPTSP Prov Jateng, Bapeda, Dispora, Disperindag, Disnaker, BPKAD, DPUPR, BPS, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kemenhunkam Kanwil Jateng, Lembaga Non Pemerintah | Data, Informasi dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Harmonisasi Draft kebijakan | |
| 6 | Melaksanakan promosi penanaman modal | DPMPTSP Prov Jateng, Diskominsta, BPS | Dokumen Kepeminatan Investasi | |
| 7 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 8 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 9 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |



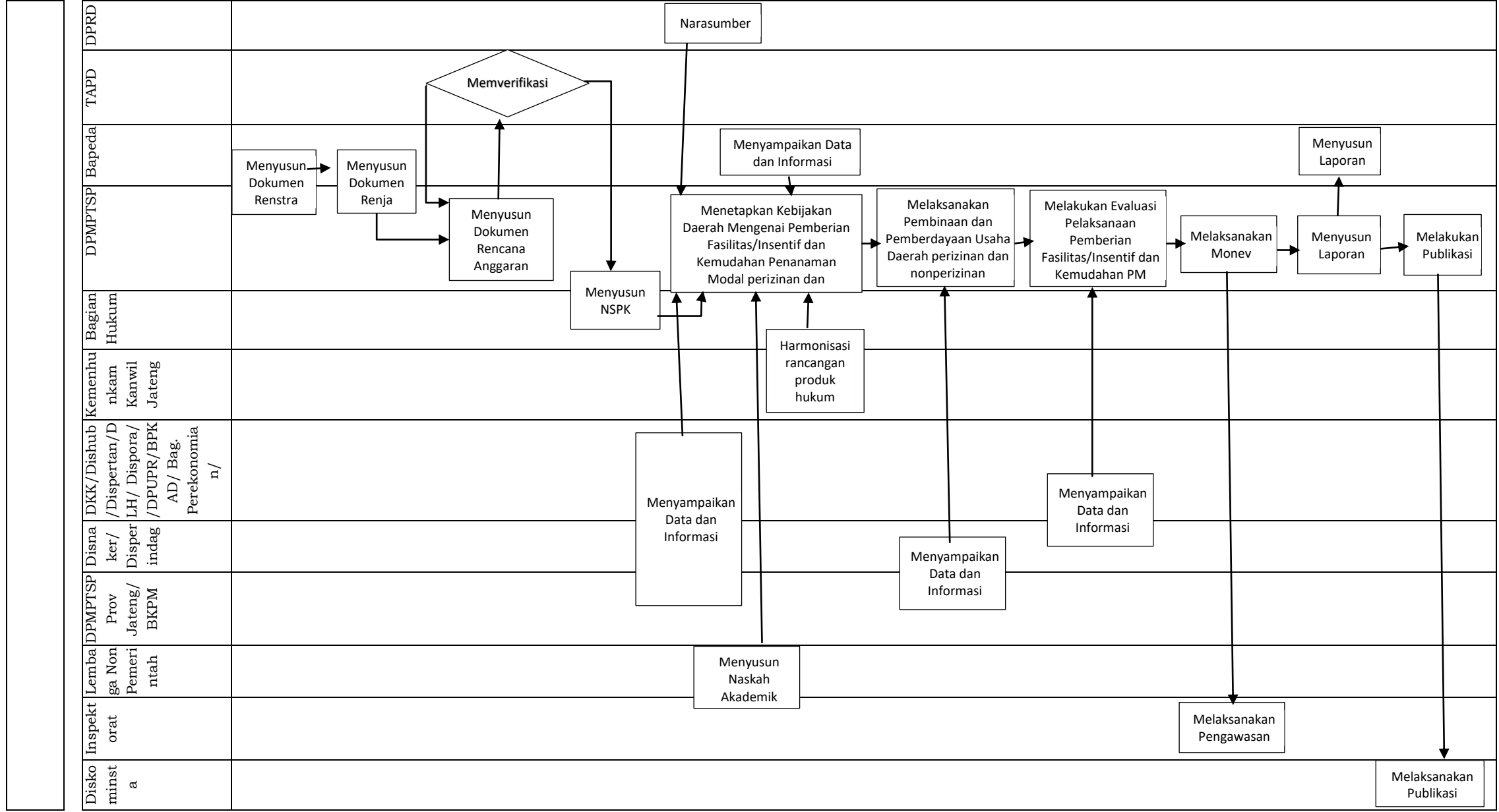
Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.02 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|---|---|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Menetapkan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Disperindag, DPUPR,BPKAD, Disnaker, DLH, BPS, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, DPRD Kota Magelang, Kemenhunkam Kanwil Jateng, DPMPTSP Prov Jateng, Biro Huku Prov Jateng, BKPM RI, Kemenhunkam RI, Lembaga Non Pemerintah | Perda/ Perwal | |
| 6 | Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Daerah | Disperindag, Disnaker, DPMPTSP Provinsi Jateng, BKPM RI | Kesepakatan Kemitraan | |
| 7 | Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Bappeda, DPUPR, BPKAD, Disperindag, Disnaker, Bagian Perekonomian, DLH, Bagian Hukum, Lembaga Non Pemerintah | Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif | |
| 8 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |



Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

| | | | | |
|----|------------------------------|------------------|--|--|
| 9 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 10 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |





Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.02 Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|---|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok peganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Bapeda, Dispora, Disperindag, DPUPR,BPKAD, Disnaker, DLH, DKK, Dispertan, Dishub, BPS, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kemenhunkam Kanwil Jateng, DPMPTSP Prov Jateng, BKPM RI, Lembaga Non Pemerintah | Perda/ Perwal RUPM | |
| 6 | Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Bapeda, Dispora, Disperindag, DPUPR,BPKAD, Disnaker, DLH, DPMPTSP Prov Jateng | Kajian Potensi dan Peluang Investasi | |
| 7 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 8 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 9 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |



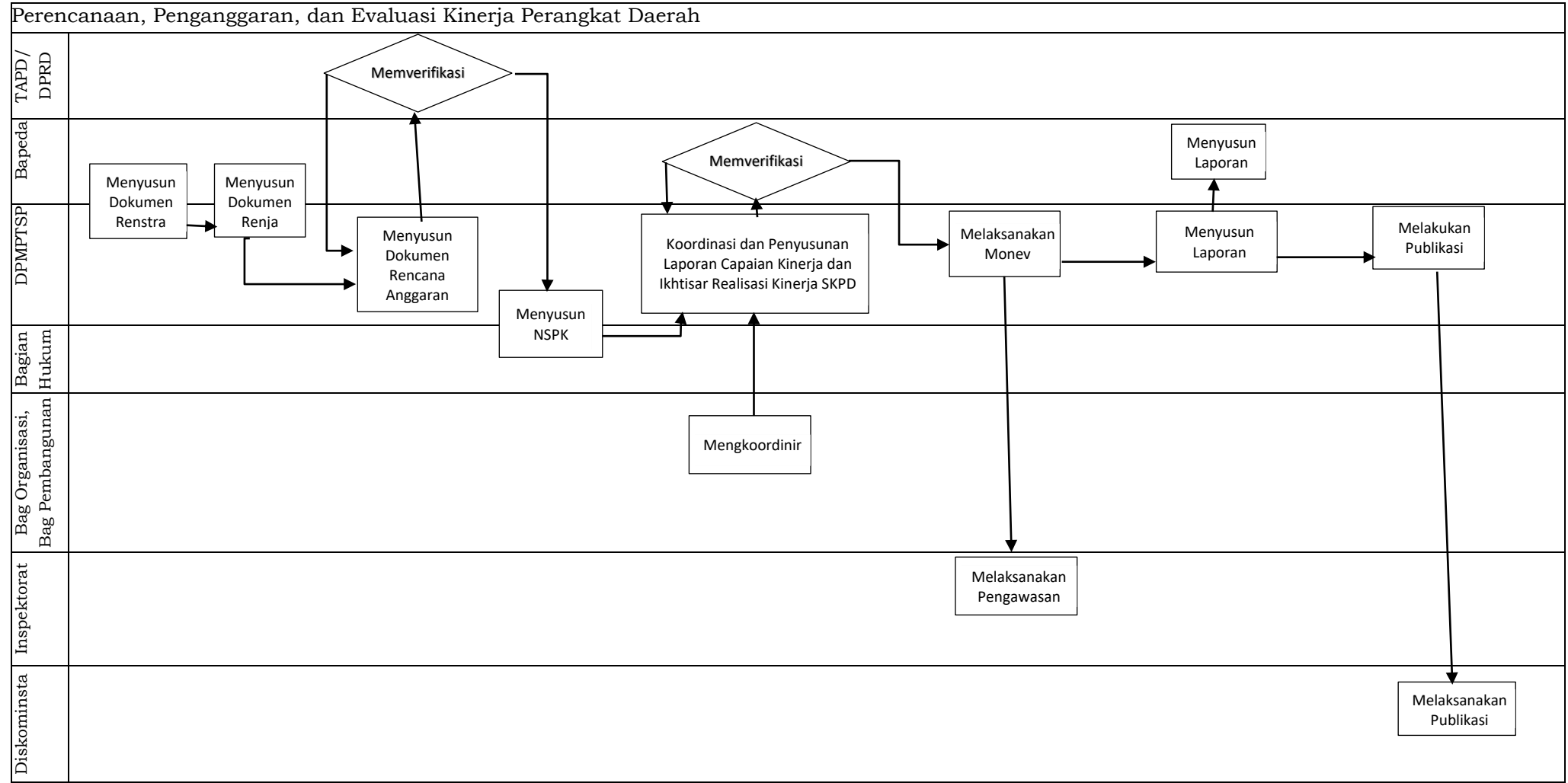
Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.03 Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang Undangan
Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok peganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | BKPM, Dispora, Disperindag, DLH, Dishub DPUPR, BPKAD, Disnaker, DKK, DPMTSP Prov Jateng, BPN, PDAM | Laporan Pembinaan, Laporan Fasilitasi Permasalahan Penanaman Modal | |
| 6 | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | BKPM, DPMPTSP Prov Jateng, Disnaker Disperindag, DLH, Dishub DPUPR, DKK, Dispertan | Berita Acara Pengawasan | |
| 7 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 8 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 9 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |

Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|---|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD, DPRD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi, Bapeda | LKJIP | |
| 6 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 7 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 8 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |

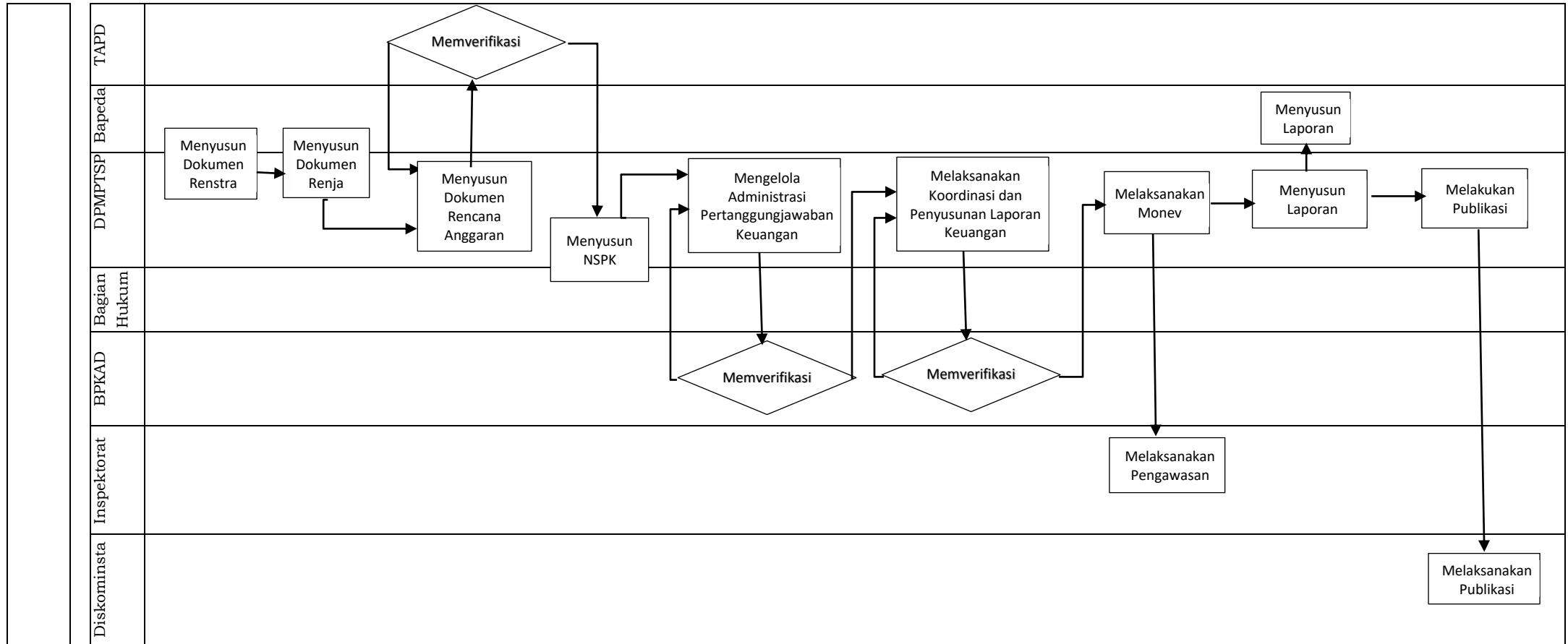
PETA LINTAS FUNGSI





Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|---|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok peganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Mengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan | BPKAD | Gaji | |
| 6 | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | BPKAD | Laporan Keuangan | |
| 6 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 7 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 8 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |





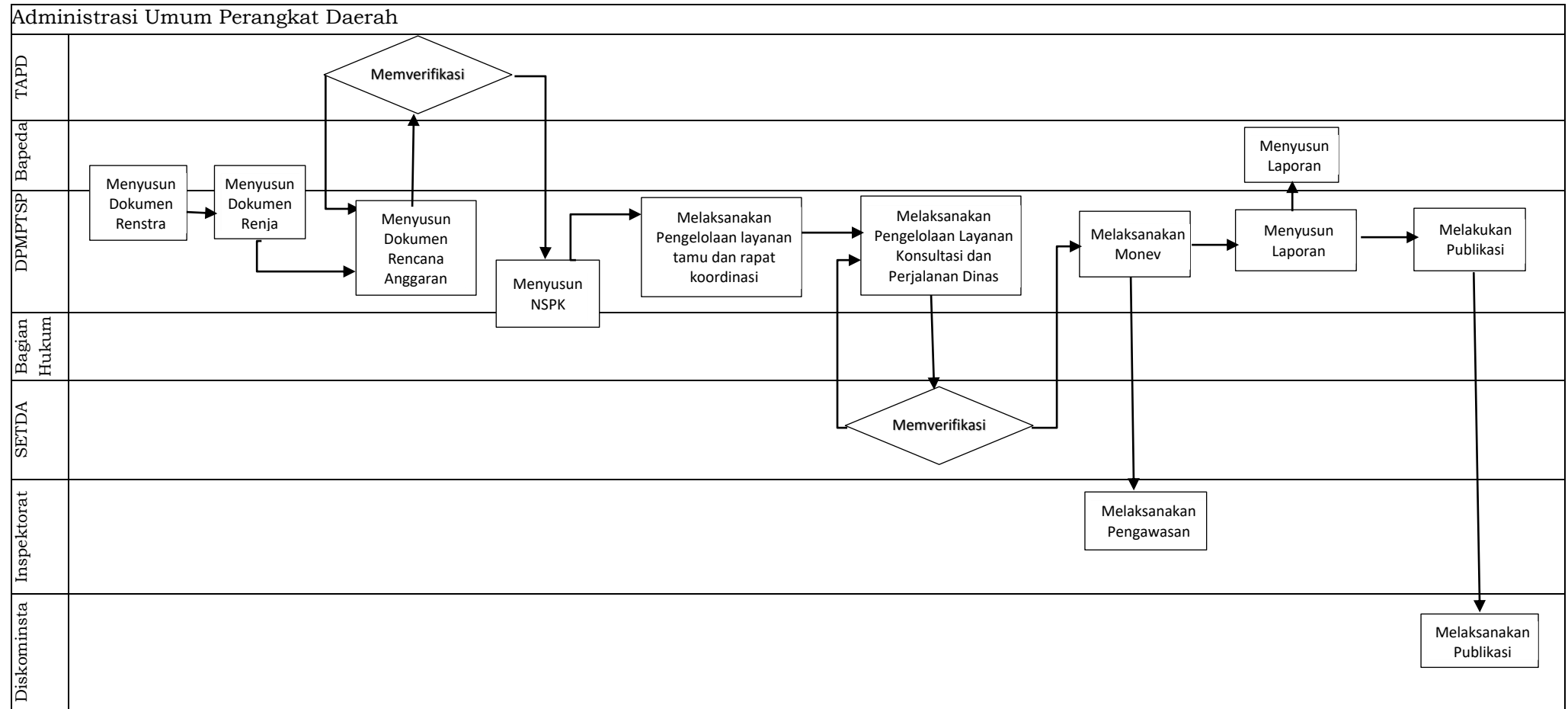
Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Mengelola Administrasi Kehadiran Pegawai | BKPSDM | Laporan Kehadiran Pegawai | |
| 6 | Mengelola Peningkatan Kompetensi Pegawai | BKPSDM | Data Peningkatan Kompetensi Pegawai | |
| 7 | Mengelola Usulan Kenaikan Pangkat/Penghentian Pegawai | BKPSDM, BPKAD | Data kenaikan pangkat/Penghentian Pegawai | |
| 8 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 9 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 10 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |

Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--------------------|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok penganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Melaksanakan Pengelolaan layanan tamu dan rapat koordinasi | | Layanan tamu dan rapat koordinasi | |
| 6 | Melaksanakan Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Perjalanan Dinas | SETDA | Layanan konsultasi dan rapat | |
| 6 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 7 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 8 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |

PETA LINTAS FUNGSI



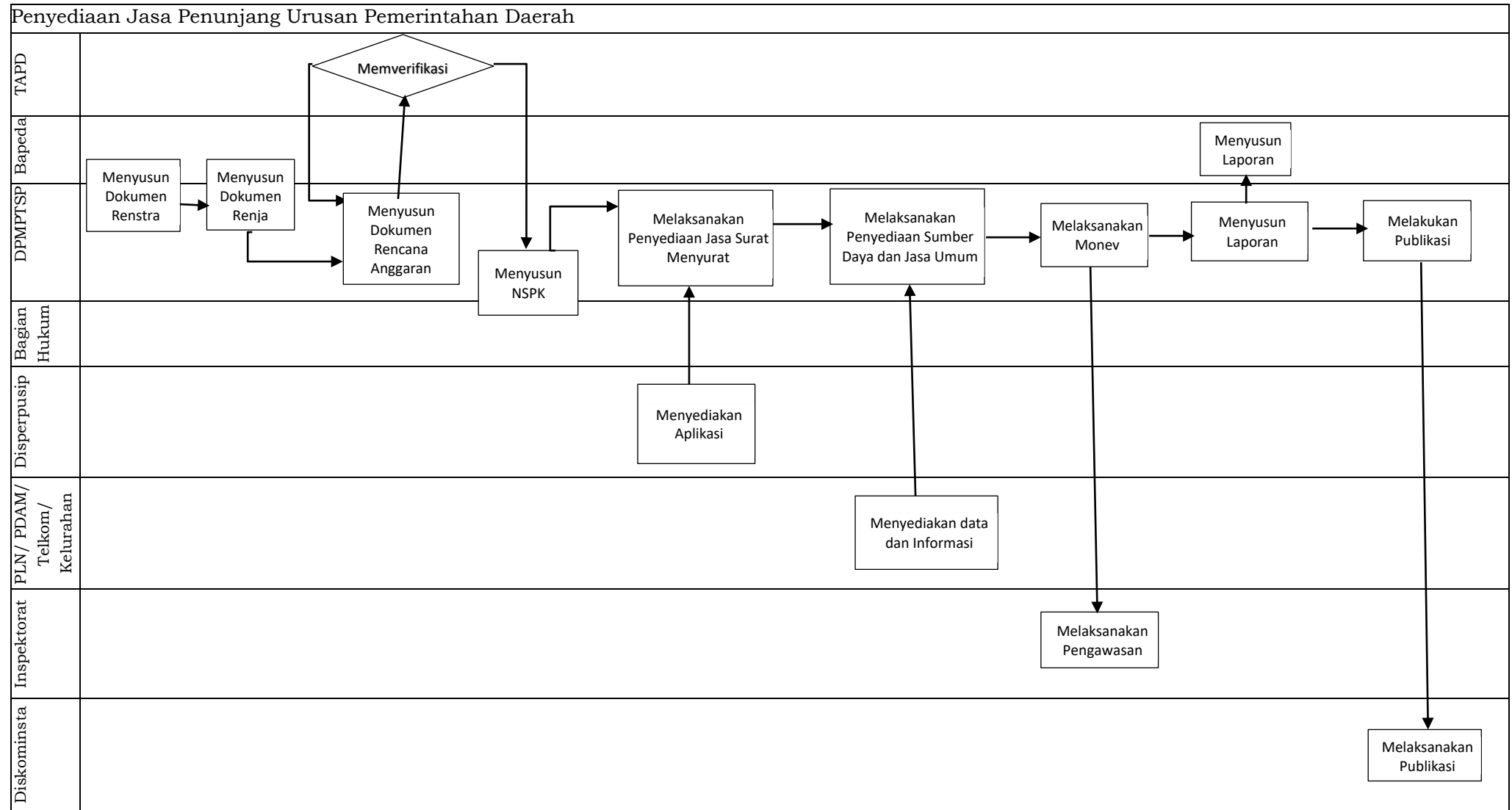
SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
2. SOP Fasilitasi Kunjungan Tamu
3. SOP Rapat Koordinasi

Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|------------------------------|---|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok peganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 5 | Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Disperpursip | Dokumen Surat menyurat | |
| 6 | Melaksanakan Penyediaan Sumber Daya dan Jasa Umum | PLN, TELKOM, PDAM, KELURAHAN | Jasa Komunikasi Air dan Listrik, Retribusi Sampah | |
| 6 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 7 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 8 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |

PETA LINTAS FUNGSI



SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah
2. SOP Penyediaan Gaji THL

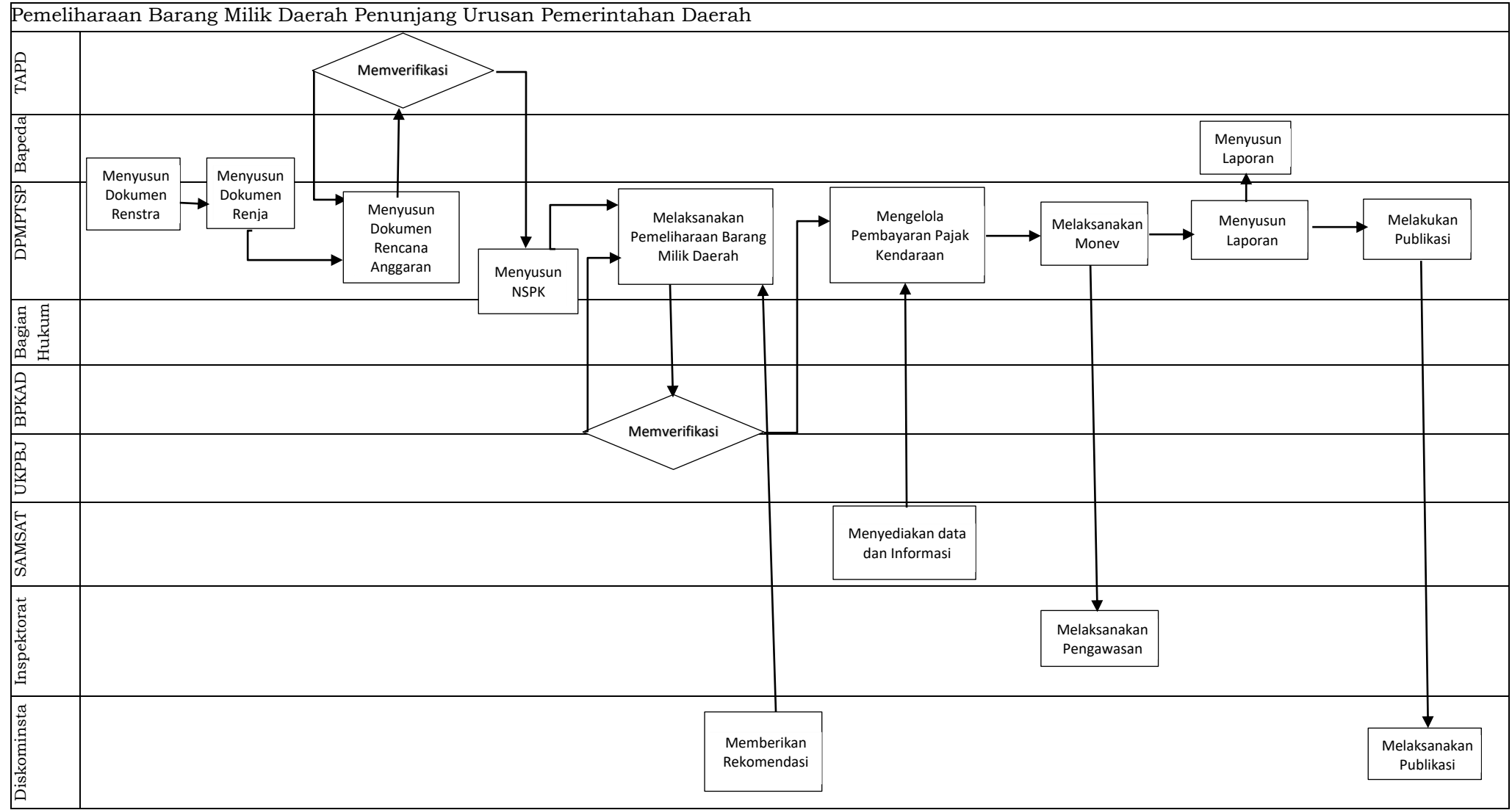
Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|---------------------------|--|----|
| 1 | Menyusun rencana strategis | BAPEDA | Renstra | |
| 2 | Menyusun rencana kerja | BAPEDA | Renja | |
| 3 | Menyusun dok peganggaran | TAPD | Dokumen Rencana Anggaran | |
| 4 | Menyusun NSPK (Proses Bisnis/SOP/KAK, dll) | Bagian Hukum | SOP, KAK, Probis, Pedoman Kerja | |
| 6 | Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | BPKAD, UKPBJ, Diskominsta | Dokumen Pemeliharaan BMD | |
| 7 | Mengelola Pembayaran Pajak Kendaraan | SAMSAT | Dokumen Pajak Kendaraan | |
| 6 | Melaksanakan Pengawasan dan Monev | Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi | |
| 7 | Menyusun Laporan Kegiatan | Bapeda | Laporan Kegiatan | |
| 8 | Melakukan Publikasi Kegiatan | BPS, Diskominsta | Publikasi Data dan Informasi Penanaman Modal | |

PETA LINTAS FUNGSI



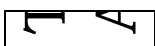
IDENTIFIKASI RINCIAN PETA LINTAS FUNGSI (LEVEL 3)

Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--|--|---------|
| 1 | Menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan | DPUPR, DKK, Disporapar, Disperindag, Dishub, Disdukcapil, DLH, Disnaker, BPKAD, Disperkim, Disdiknas, Dinsos, Dispertan, UKPBJ, Lembaga Non Pemerintah | SOP, SP | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan penyebarluasan informasi mekanisme pelayanan perizinan | DKK, Dishub, Dispertan, DLH | Leaflet, Laporan Sosialisasi, e- Informasi | |
| 3 | Melaksanakan Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan | Lembaga Non Pemerintah | | |
| 4 | Melaksanakan Pelayanan MPP Digital | KemenpanRB, Kemenkes, Kominfo, Kemendagri, DKK, Disdukcapil | Perizinan Kesehatan | |
| 5 | Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha | Kemendagri, KemenpanRB, Kominfo, BKPM, Kementrian PUPR, Kemenkes, Kementrian ATR, BPN, Disperindag, DKK, Disporapar, Disdikbud, DPUPR, DLH, Disnaker, Dishub, Dispertan, Kesbangpolinmas, BPKAD, Bag Organisasi, DPMPTSP Prov Jateng | Perizinan dan Nonperizinan | |
| 6 | Melaksanakan Penjaminan Mutu Layanan | Lembaga Non Pemerintah | Sertifikasi ISO | |
| 7 | Melaksanakan monitoring dan evaluasi | DKK, Dishub, Dispertan, DLH, DPUPR, Disdikbud, Disperindag, Disnaker, Disporapar | Laporan monev perizinan dan nonperizinan | |



| | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|
| 8 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan | | Laporan Perizinan | |
| 9 | Publikasi Data dan Informasi Perizinan | | Data dan Informasi Perizinan | |



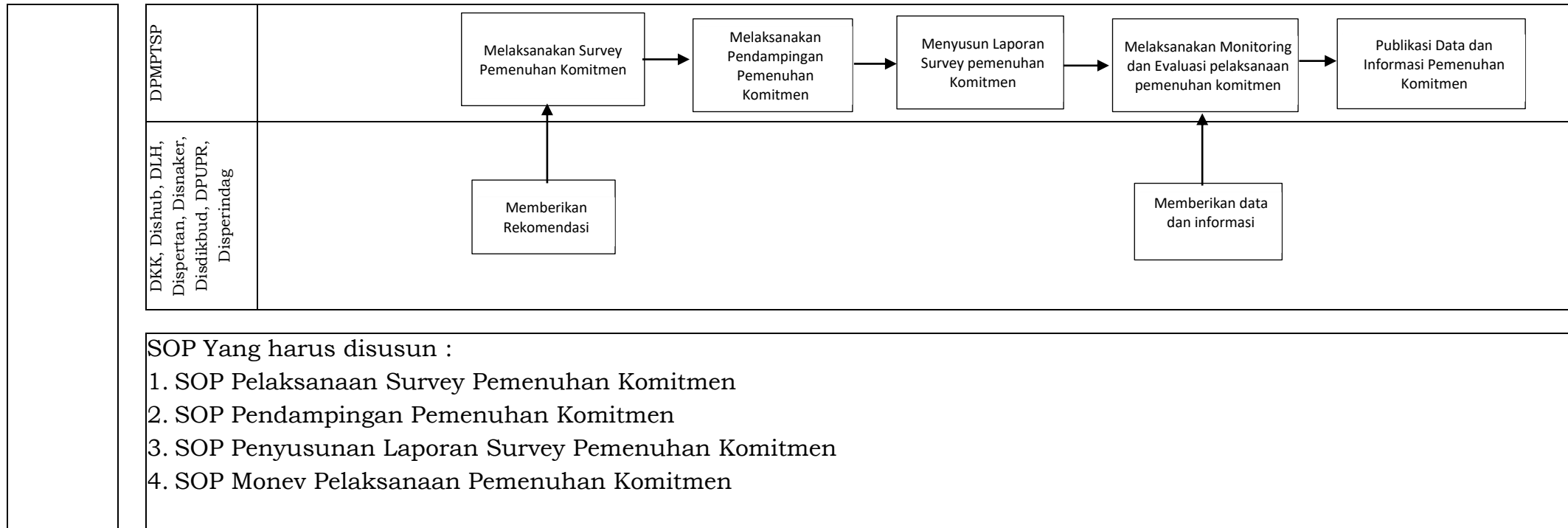
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

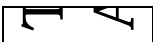
Proses

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--|---------------------------------|---------|
| 1 | Identifikasi Bahan Survey Pemenuhan Komitmen | | Bahan Survey Pemenuhan Komitmen | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Survey Pemenuhan Komitmen | DKK, Dishub, Dispertan, DLH, Disnaker, DPUPR, Disdikbud, Disperindag | BAP | |
| 3 | Melaksanakan Pendampingan Pemenuhan Komitmen | | Perizinan Berusaha | |
| 4 | Menyusun Laporan Survey pemenuhan Komitmen | | Laporan | |
| 5 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemantauan komitmen | DKK, Dishub, Dispertan, DLH, Disnaker, DPUPR, Disdikbud, Disperindag | Laporan Monev | |
| 6 | Publikasi Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen | | Publikasi Kegiatan | |

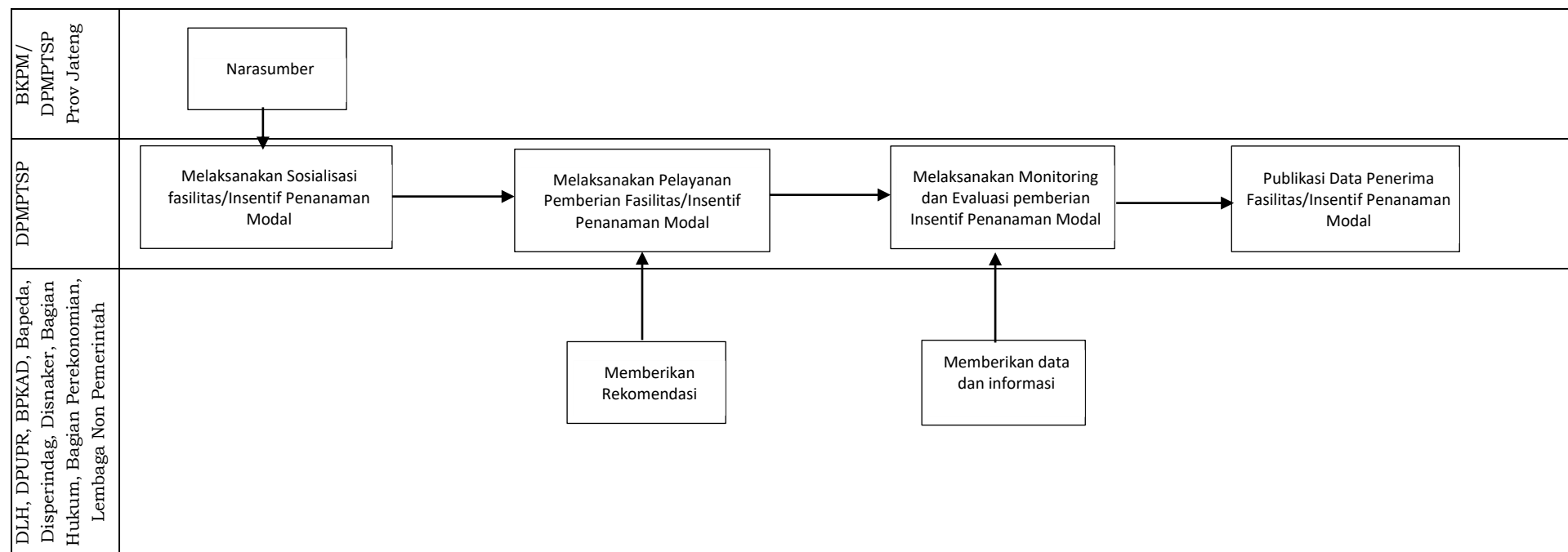




Pelayanan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal

Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.03 Pelayanan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal

| No | Kegiatan | Unit Kerja | Output | PJ |
|----|---|---|--|---------|
| 1 | Melaksanakan Sosialisasi fasilitas/Insentif Penanaman Modal | DPMPTSP Prov Jateng, BKPM | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Pelayanan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | DLH, DPUPR, BPKAD, Bapeda, Disperindag, Disnaker, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Lembaga Non Pemerintah | Insentif /Kemudahan PM | |
| 3 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif Penanaman Modal | DLH, DPUPR, BPKAD, Bapeda, Disperindag, Disnaker, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Lembaga Non Pemerintah | Laporan Monev Pemberian Insentif/ Kemudahan PM | |
| 4 | Publikasi Data Penerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | | Publikasi Kegiatan | |



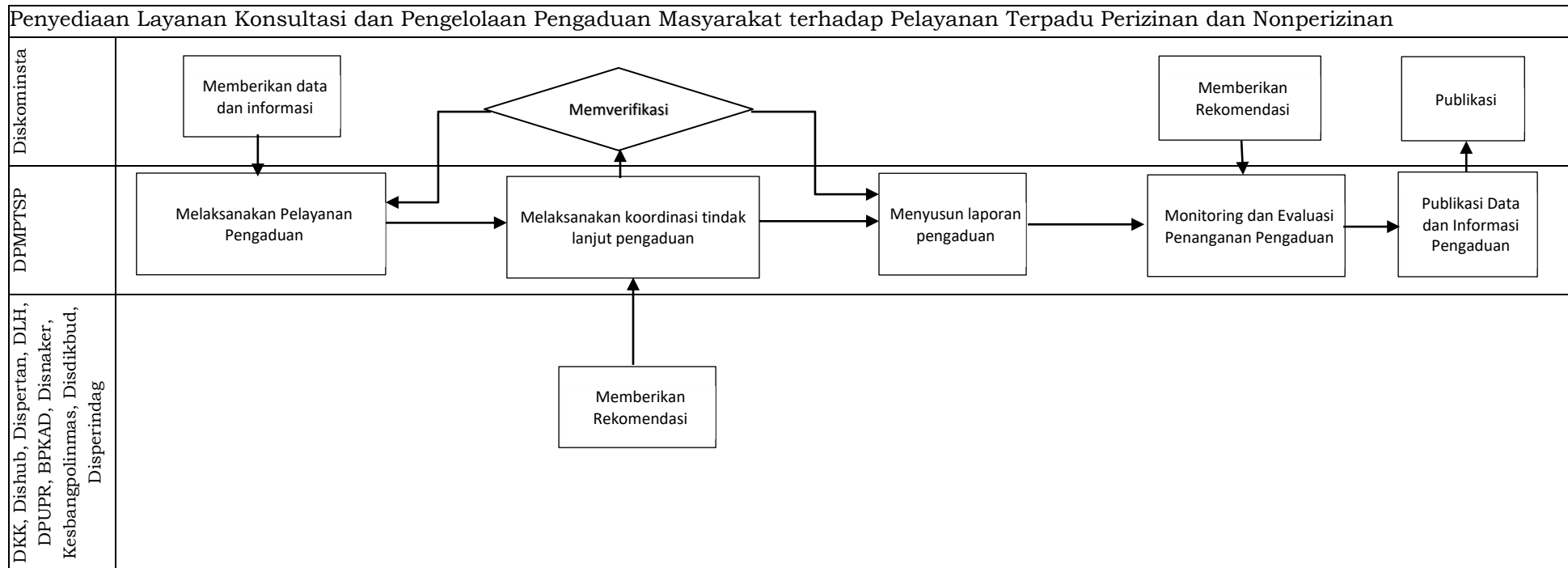
SOP Yang harus disusun :

1. SOP Sosialisasi Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. SOP Pelayanan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
3. SOP Monev Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
4. SOP Publikasi Data dan Informasi Penerima fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.04 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

| No | Kegiatan | Unit Kerja | Output | PJ |
|----|---|---|---------------------------------|---------|
| 1 | Melaksanakan Pelayanan Pengaduan | Diskominsta | Dokumen Pengaduan | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan koordinasi tindak lanjut pengaduan | DKK, Dishub, Dispertan, DLH, Disnaker, DPUPR, BPKAD, Kesbangpolinmas, Disdikbud, Disperindag, Diskominsta | Hasil Tindak lanjut Pengaduan | |
| 3 | Menyusun laporan pengaduan | | Laporan Pengaduan | |
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan | Diskominsta | Laporan Monitoring dan Evaluasi | |
| 5 | Publikasi Data dan Informasi Pengaduan | Diskominsta | Publikasi Kegiatan | |

PETA LINTAS FUNGSI



- SOP Yang harus disusun :
1. SOP Pelayanan Pengaduan
 2. SOP Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan
 3. SOP Penyusunan Laporan Pengaduan
 4. SOP Monev Penanganan Pengaduan
 5. SOP Publikasi Data dan Informasi Pengaduan

P
r
o
s
e
s
:
M
G

G.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.02 Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.02.CFM.01 Pelaksanaan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi

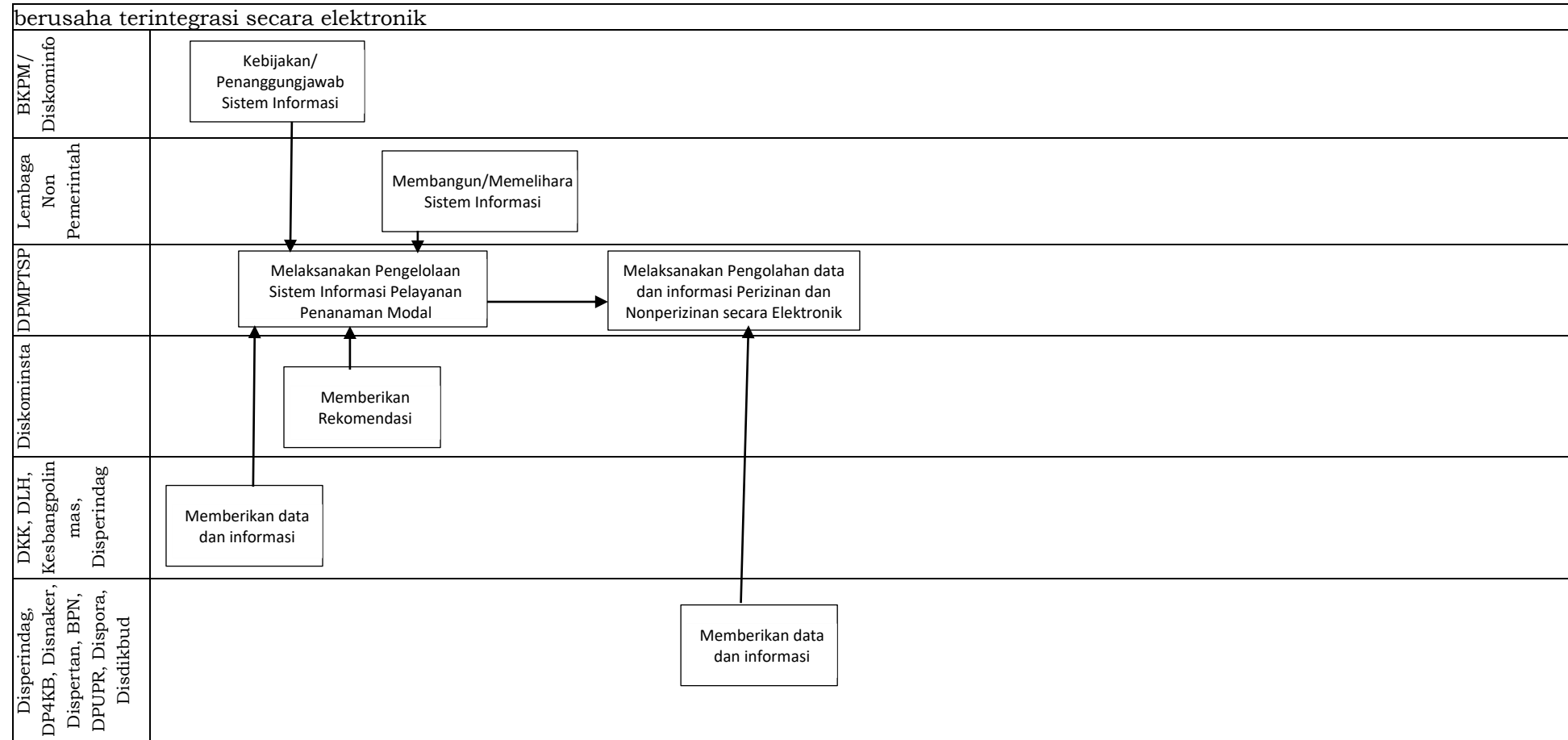
Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.02.CFM.01.01 Melaksanakan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

| No | Kegiatan | Unit Kerja | Output | PJ |
|----|----------|------------|--------|----|
|----|----------|------------|--------|----|

1 A

Pelaksanakan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------|
| 1 | Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal | BKPM, Diskominfo, Diskominsta, DKK, DLH, Kesbangpolinmas, Disperindag, Lembaga Non Pemerintah | Sistem Informasi yang running well | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Pengolahan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik | Disperindag, DP4KB, Dispertan, Dispora, Disnaker, Disdikbud, DPUPR, BPN | Data dan Informasi Penanaman Modal | |



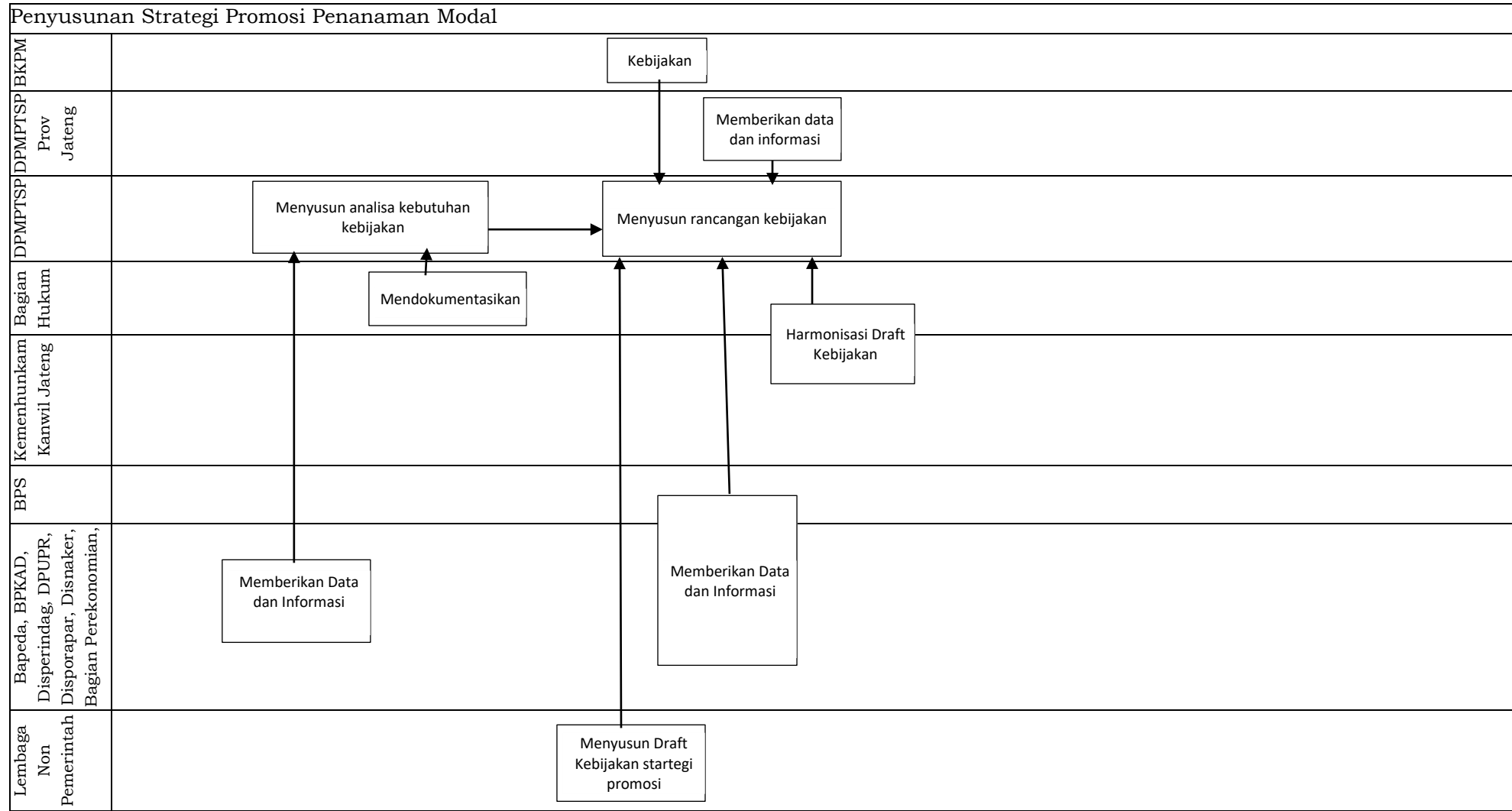
SOP Yang harus disusun :

1. SOP Pengembangan Aplikasi
2. SOP Helpdesk
3. SOP Pengelolaan Data dan Informasi
4. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik
5. SOP Permohonan data

Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.01 Peningkatan Kepeminatan Investasi
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|
| 1 | Menyusun analisa kebutuhan kebijakan | Bapeda, Disporapar, Disperindag, Disnaker, BPKAD, DPUPR, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian | Data analisis Kebutuhan Kebijakan | DPMPTSP |
| 2 | Menyusun rancangan kebijakan | BKPM, DPRD, DPMPTSP Prov Jateng, Bapeda, Disporapar, Disperindag, Disnaker, BPKAD, DPUPR, BPS, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kemenhunkam Kanwil Jateng, Lembaga Non Pemerintah | Draft Kebijakan | |

PETA LINTAS FUNGSI



SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan kebijakan
2. SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan



Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

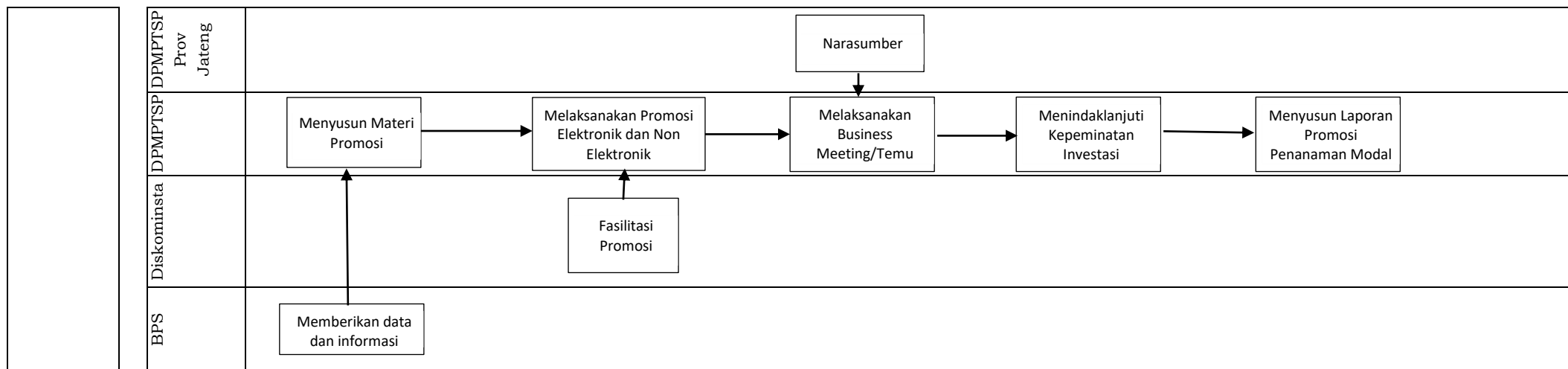
Proses

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.01 Peningkatan Kepeminatan Investasi

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.01.CFM.01.02 Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

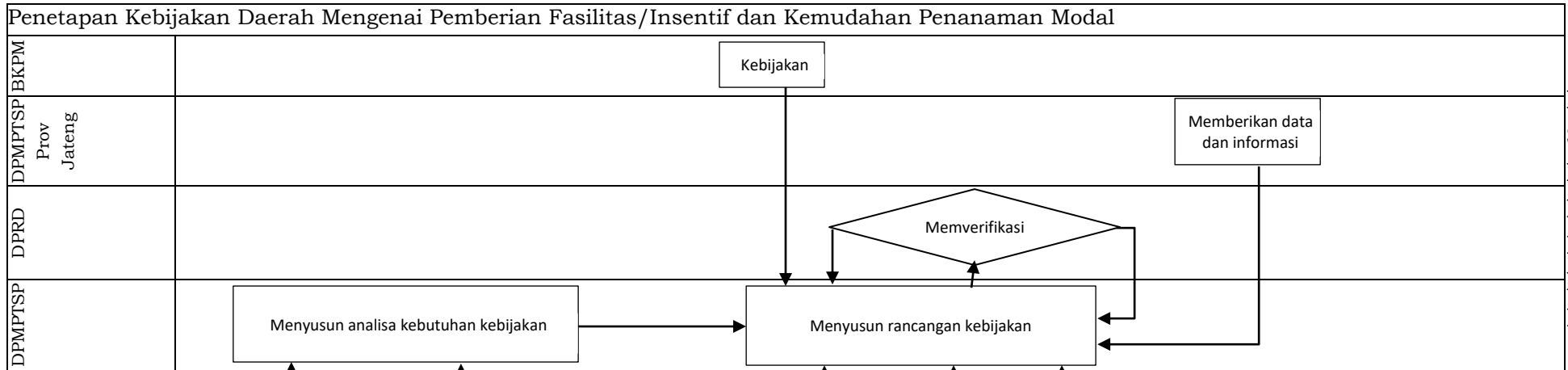
| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|------------------------------|--|----|
| 1 | Menyusun Materi Promosi | BPS, Diskominsta | Leaflet | |
| 2 | Melaksanakan Promosi Offline dan Online | Diskominsta | Baliho, Materi Promosi Online | |
| 3 | Melaksanakan Business Meeting/Temu Investor | DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah | Dokumen Kepeminatan Investasi | |
| 4 | Menindaklanjuti Kepeminatan Investasi | | Laporan hasil Tindak lanjut | |
| 5 | Menyusun Laporan Promosi Penanaman Modal | | Data, Informasi dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |



SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penyusunan Materi Promosi
2. SOP Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik dan Non Elektronik
3. SOP Pameran Investasi
4. SOP Bahan Business Meeting/Temu Investor
5. SOP Pelaksanaan Business Meeting/ Temu Investor
6. SOP Tindak Lanjut Kepeminatan Investasi
7. SOP Penyusunan Laporan Promosi PM

PETA LINTAS FUNGSI



Proses
Sub
Proses
Lintas
Fungsi
Lintas
Fungsi

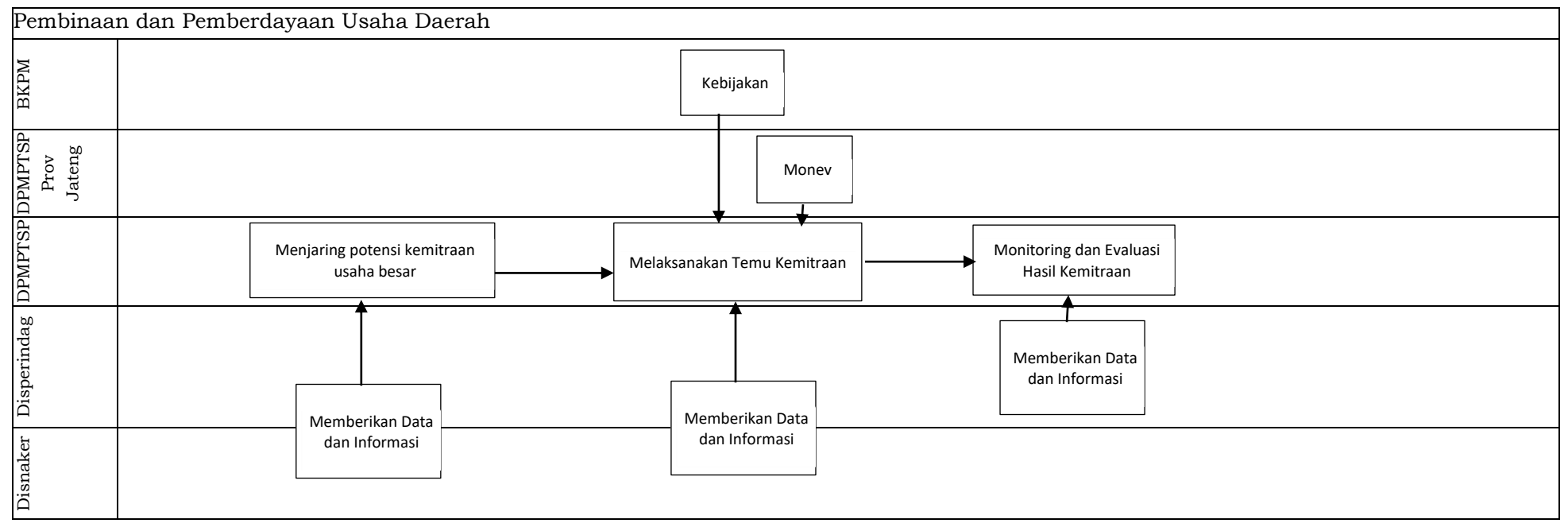
| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| 1 | Menyusun analisa kebutuhan kebijakan | BPKAD, Disperindag, Disnaker, DLH, DPUPR, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Lembaga Non Pemerintah | Data Kebutuhan Rancangan Kebijakan | DPMPTSP |
| 2 | Menyusun rancangan kebijakan | BKPM RI, DPMPTSP Prov Jateng, DPRD, Biro Hukum Prov Jateng, Kemenkumham RI, Kemenkumham Kanwil Jateng, Bagian Hukum, Lembaga Non Pemerintah, Bagian Perekonomian, BPKAD, Disperindag, Disnaker, DLH, DPUPR | Draft Kebijakan | |

| | | |
|--|---|---|
| | BPKAD, Disperindag, Disnaker, DLH, DPUPR, Bagian Perekonomian | <div data-bbox="632 240 812 358" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Memberikan Data dan Informasi</div> <div data-bbox="1310 207 1490 326" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Memberikan Data dan Informasi</div> |
| | Bagian Hukum | <div data-bbox="832 423 1039 505" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mendokumentasikan</div> |
| | Biro Hukum Prov Jateng, Kemenhunkam Kanwil Jateng, Kemenhunkam RI | <div data-bbox="1597 461 1779 586" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Harmonisasi Draft Kebijakan</div> |
| | Lembaga Non Pemerintah | <div data-bbox="1398 695 1589 764" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Menyusun Draft Kebijakan</div> |
| <p>SOP Yang harus disusun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan kebijakan 2. SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan | | |

Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.02 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.02.CFM.01.02 Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Daerah

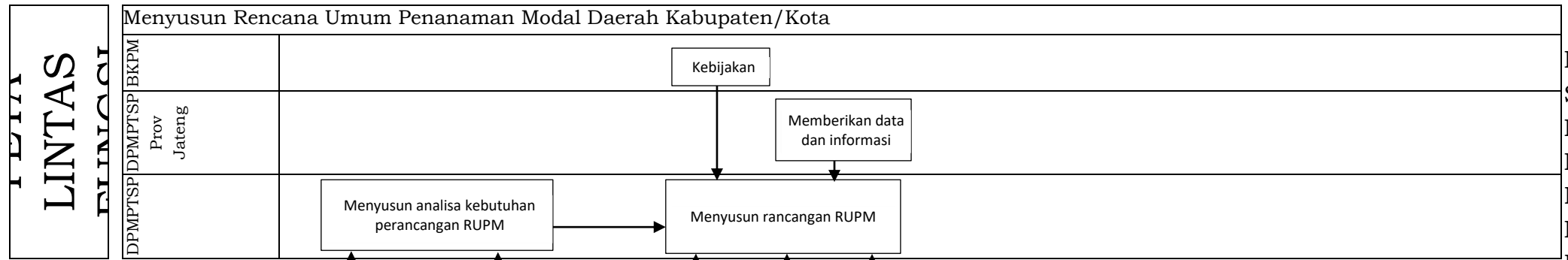
| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--|---|---------|
| 1 | Menjaring potensi kemitraan usaha besar | Disperindag, Disnaker | Laporan Hasil Penjaringan Potensi Kemitraan | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Temu Kemitraan | BKPM RI, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Disperindag, Disnaker | Dokumen Kesepakatan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM | |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Hasil Kemitraan | Disperindag, Disnaker | Laporan Monev Hasil kemitraan | |

PETA LINTAS FUNGSI



SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penjaringan Potensi Kemitraan Usaha Besar
2. SOP Pelaksanaan Temu Kemitraan
3. SOP Monitoring dan Evaluasi Hasil Kemitraan



Proses
 Sub
 Proses
 Lintas
 Fungsi : M
 Lintas
 Fungsi : M

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|---|--------------------------------------|---------|
| 1 | Menyusun analisa kebutuhan perancangan RUPM | Bapeda, BPKAD, Disperindag, Disnaker, DLH, DPUPR, DKK, Dispertan, Dishub, Disporapar, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum | Data Kebutuhan Rancangan Kebijakan | DPMPTSP |
| 2 | Menyusun rancangan RUPM | BKPM, DPMPTSP Prov Jateng, Kemenkumham Kanwil Jateng, Bagian Hukum, Lembaga Non Pemerintah | Keterangan Penjelas, Draft Kebijakan | |

| | |
|---|--|
| Lembaga Non Pemerintah | Menyusun Draft Kebijakan |
| Kemenhankamwil Jateng | Harmonisasi Draft Kebijakan |
| Bagian Hukum | Memberikan Data dan Informasi Mendokumentasikan |
| Bappeda, BPKAD, Disperindag, Disnaker, DLH, DPUPR, DKK, Dispartan, Dishub, Disporapar, Bagian Perencanaan | Memberikan Data dan Informasi |

SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan RUPM
2. SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan RUPM

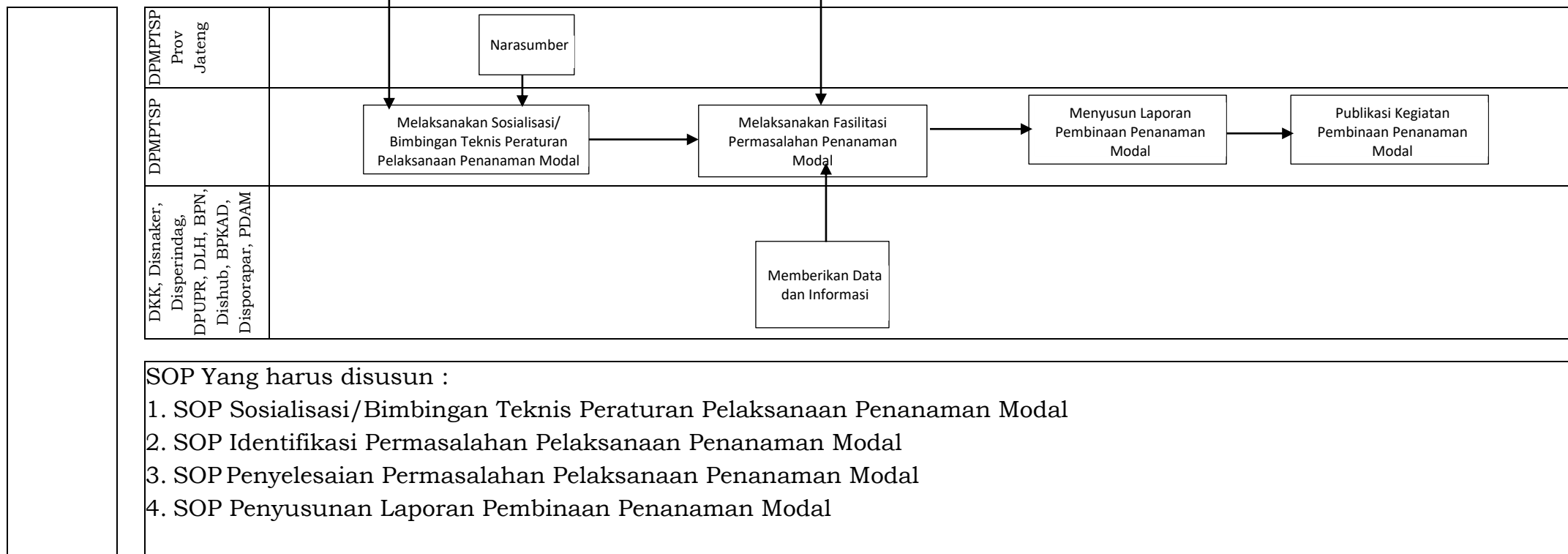
Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.03 Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang Undangan
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|---|--|----|
| 1 | Melaksanakan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal | BKPM, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah | Laporan Sosialisasi | |
| 2 | Melaksanakan Fasilitasi Permasalahan Pelaku Usaha | BKPM, DKK, Disnaker, Disperindag, DPUPR, DLH, BPN, Dishub, Dispora, BPKAD, PDAM | Laporan Fasilitasi Permasalahan Pelaku Usaha | |
| 3 | Menyusun Laporan Pembinaan Penanaman Modal | | Laporan Pembinaan | |

TA
S

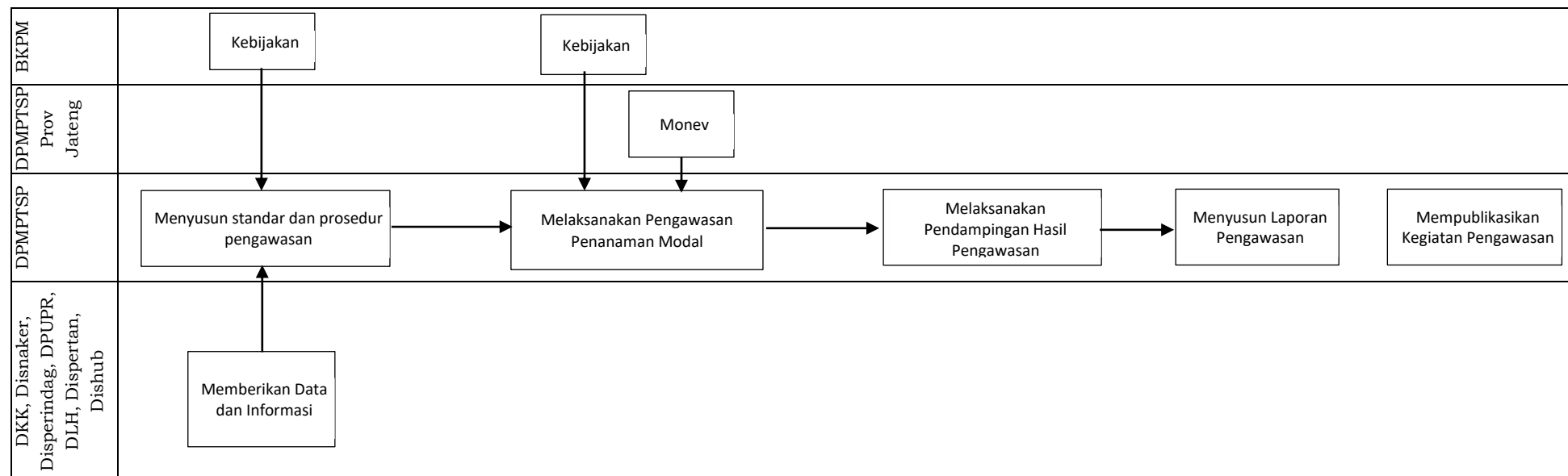
| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | |
| BKPM | | Kebijakan | Kebijakan |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | Publikasi Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal | | Publikasi data dan informasi Pembinaan penanaman modal | |
|---|--|--|--|--|



Proses : MGG.DPMPTSP.02 Peningkatan investor dan penyerapan tenaga kerja
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.02.03 Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang Undangan
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--|--|---------|
| 1 | Menyusun standar dan prosedur pengawasan | DKK, Disnaker, Disperindag, DPUPR, DLH, Dispertan, Dishub | SOP, Mekanisme Pengawasan | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal | BKPM, DPMPTSP Prov Jateng, DKK, Disnaker, Disperindag, DPUPR, DLH, Dispertan, Dishub | BAP | |
| 3 | Melaksanakan Pendampingan Hasil Pengawasan | | Laporan Hasil Pendampingan | |
| 4 | Menyusun Laporan Pengawasan | | Laporan Pengawasan | |
| 5 | Publikasi Kegiatan Pengawasan | | Publikasi data dan informasi pengawasan PM | |

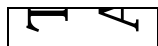


SOP Yang harus disusun :

1. SOP Penyusunan Standar dan Prosedur Pengawasan
2. SOP Pengawasan Penanaman Modal
3. SOP Pencabutan Likuidasi Izin berusaha
4. SOP Pendampingan Hasil Pengawasan
5. SOP Penyusunan Laporan Pengawasan

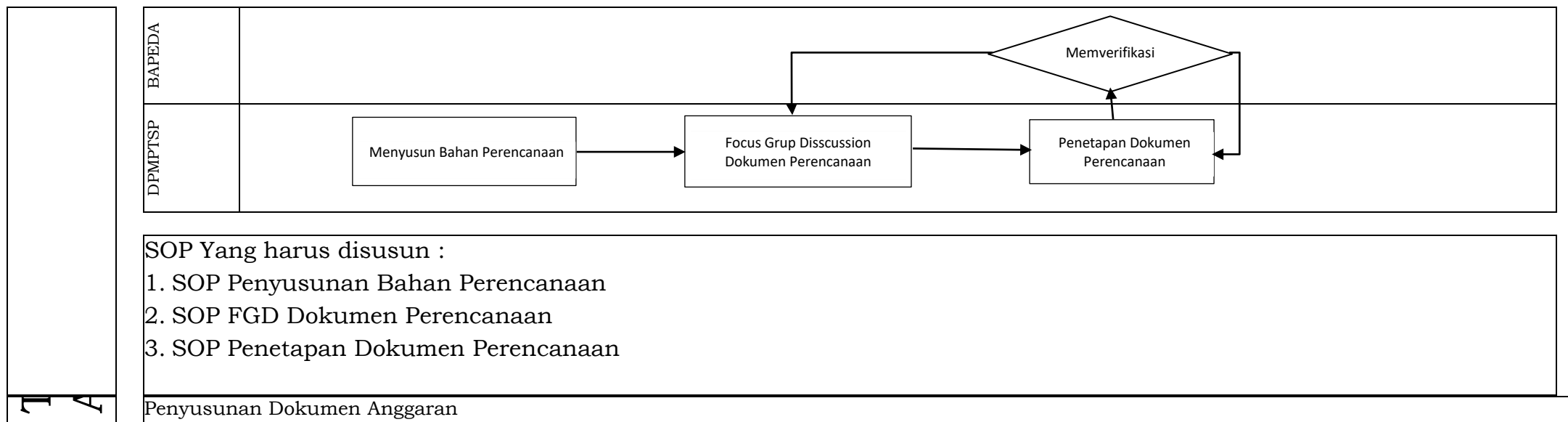
Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Menyusun Bahan Perencanaan | | Bahan Perencanaan | DPMPTSP |
| 2 | Focus Grup Discussion Dokumen Perencanaan | | Berita Acara | |



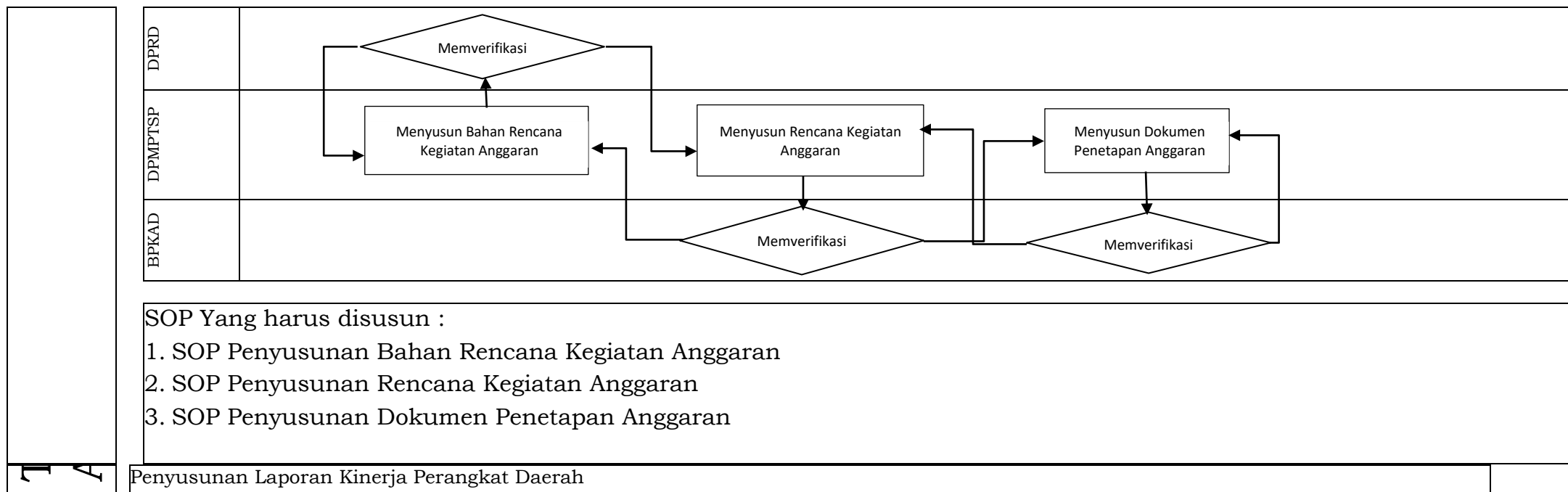
Penyusunan Dokumen Perencanaan

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------|---------------------|--|
| 3 | Penetapan Dokumen Perencanaan | Bapeda | Dokumen Perencanaan | |
|---|-------------------------------|--------|---------------------|--|



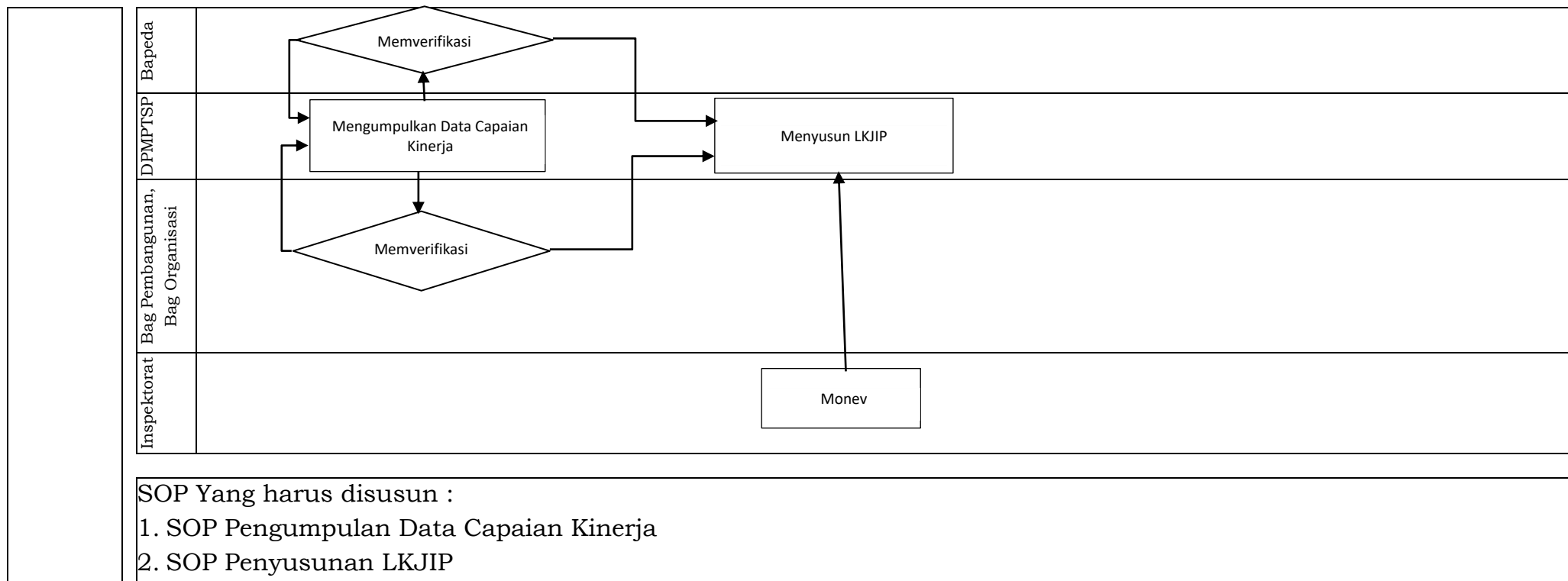
Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01.02 Penyusunan Dokumen Anggaran

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--------------------|----------------|---------|
| 1 | Menyusun Bahan Rencana Kegiatan Anggaran | DPRD | Bahan RKA/RKPA | DPMPTSP |
| 2 | Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran | BPKAD | RKA/RKPA | |
| 3 | Menyusun Dokumen Penetapan Anggaran | BPKAD | DPA/DPPA | |



Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.01.03 Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|-----------------------------------|---|-----------------|---------|
| 1 | Mengumpulkan Data Capaian Kinerja | BAPEDA, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi | Capaian Kinerja | DPMPTSP |
| 2 | Menyusun LKJIP | Inspektorat | LKJIP | |



Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

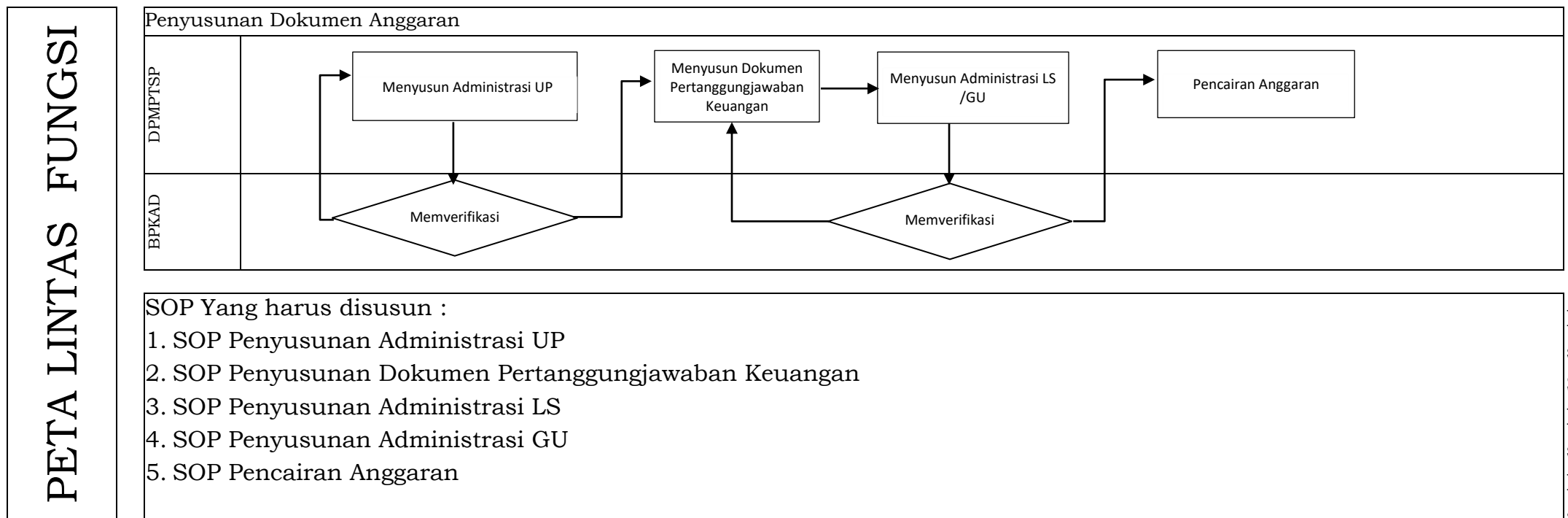
Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02.01 Penyusunan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--------------------------|--------------------|------------|----|
| 1 | Menyusun Administrasi UP | BPKAD | Dokumen UP | |
| 2 | Menyusun Administrasi LS | BPKAD | Dokumen LS | |

| | | | | |
|---|--------------------------|-------|------------|--|
| 3 | Menyusun Administrasi GU | BPKAD | Dokumen GU | |
|---|--------------------------|-------|------------|--|

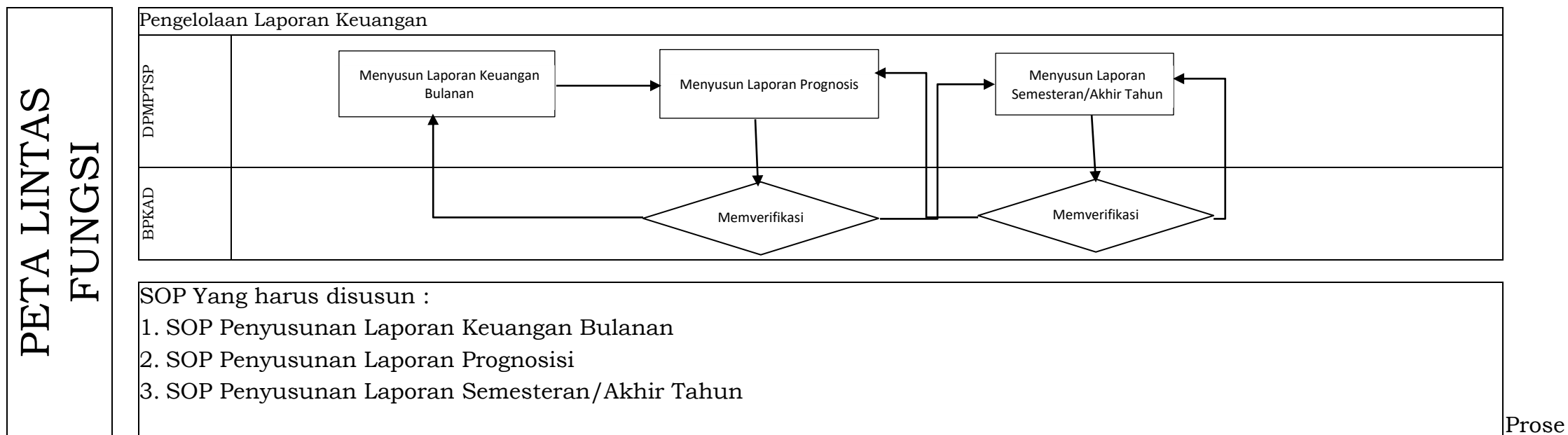


Prose
s
Sub
Prose
s
Linta
s

Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.02.02 Pengelolaan Laporan Keuangan

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|--------------------------------|----|
| 1 | Menyusun Laporan Keuangan Bulanan | | Laporan Keuangan Bulanan | |
| 2 | Menyusun Laporan Prognosis | BPKAD | Laporan Prognosis | |
| 3 | Menyusun Laporan Semesteran/Akhir Tahun | BPKAD | Laporan Semesteran/Akhir Tahun | |

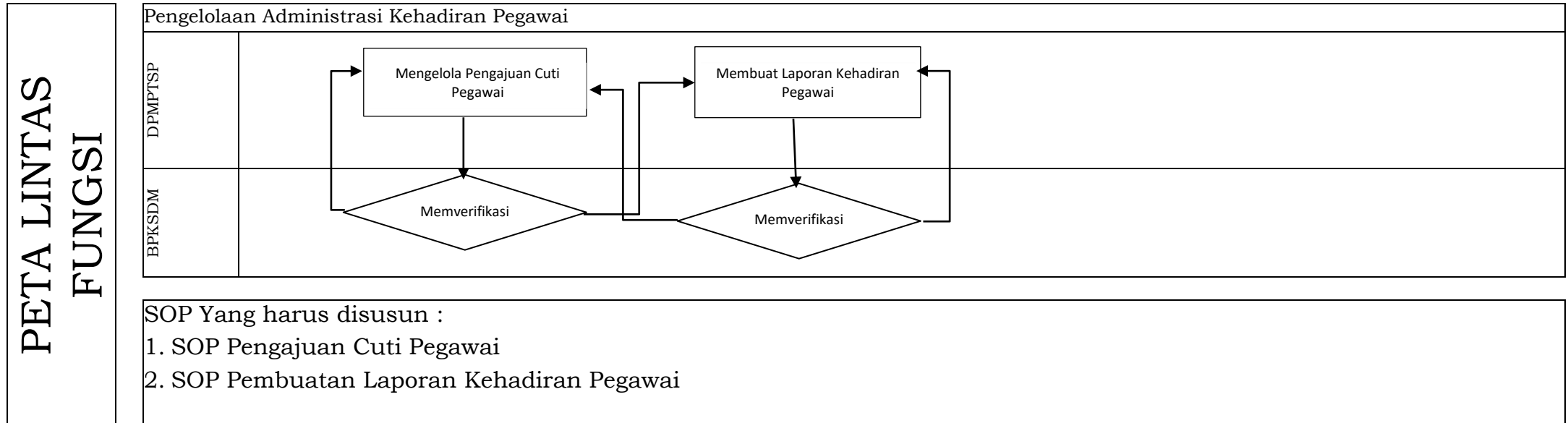


Prose

s : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.01 Pengelolaan Administrasi Kehadiran Pegawai

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----|
| 1 | Mengelola Pengajuan Cuti Pegawai | BPKSDM | Dokumen Pengajuan Cuti | |
| 2 | Membuat Laporan Kehadiran Pegawai | BPKSDM | Laporan Kehadiran | |



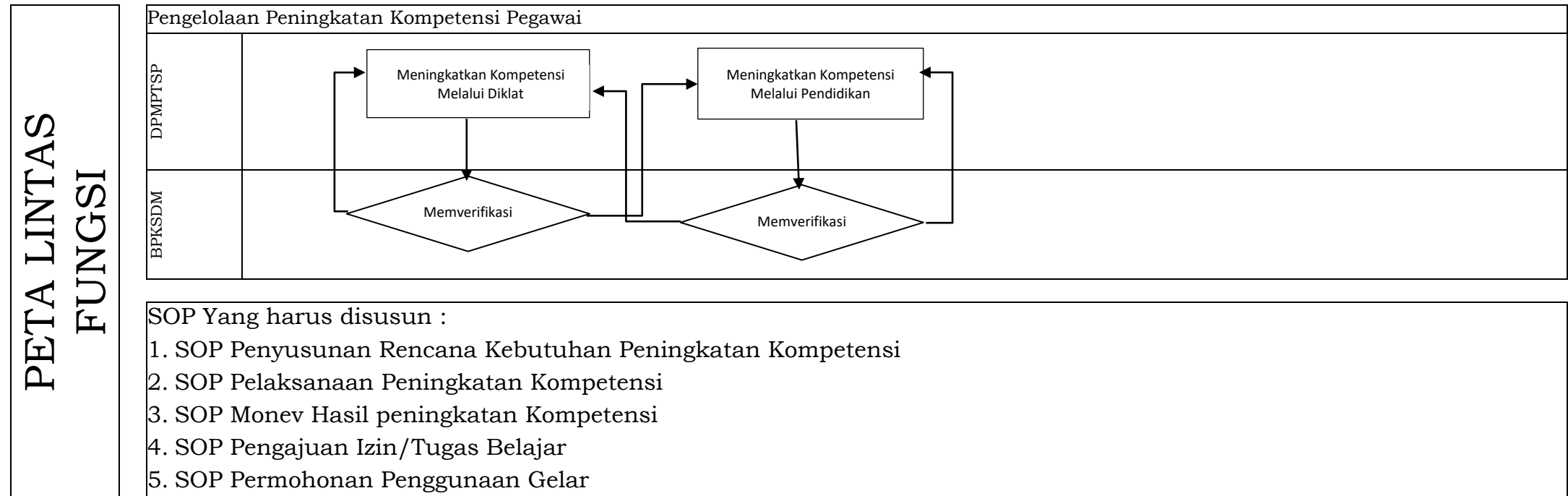
Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02 Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Pegawai

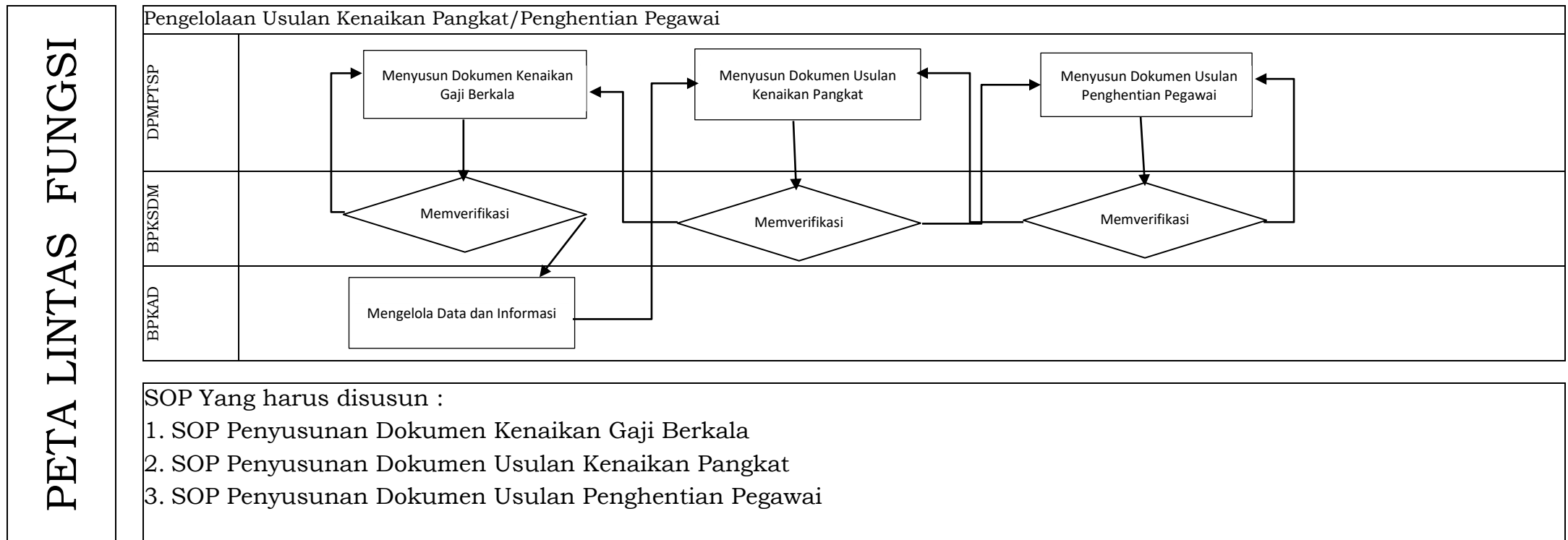
| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--------------------|----------------------------|----|
| 1 | Meningkatkan Kompetensi Melalui Diklat | BPKSDM | Surat Perintah Diklat | |
| 2 | Meningkatkan Kompetensi Melalui Pendidikan | BPKSDM | Izin Belajar/Tugas Belajar | |



Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

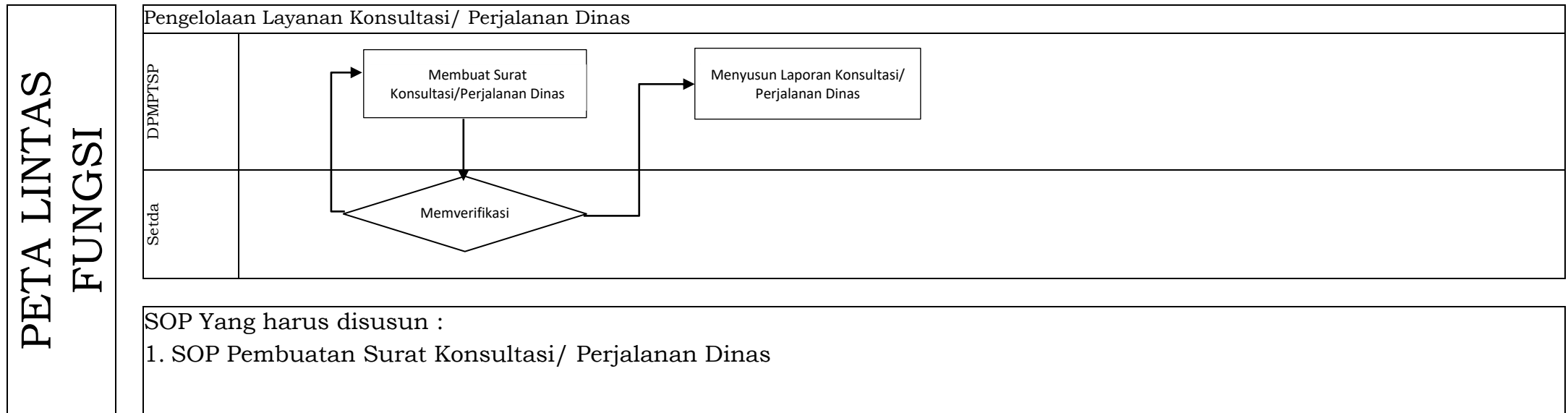
Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.03 Pengelolaan Usulan Kenaikan Pangkat/Penghentian Pegawai

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|------------------------------|----|
| 1 | Menyusun Dokumen Kenaikan Gaji Berkala | BPKSDM, BPKAD | Usulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 2 | Menyusun Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat | BPKSDM | Usulan Kenaikan Pangkat | |
| 3 | Menyusun Dokumen Usulan Penghentian Pegawai | BPKSDM | Usulan Pensiun | |



Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.04.01 Pengelolaan Layanan Konsultasi/ Perjalanan Dinas

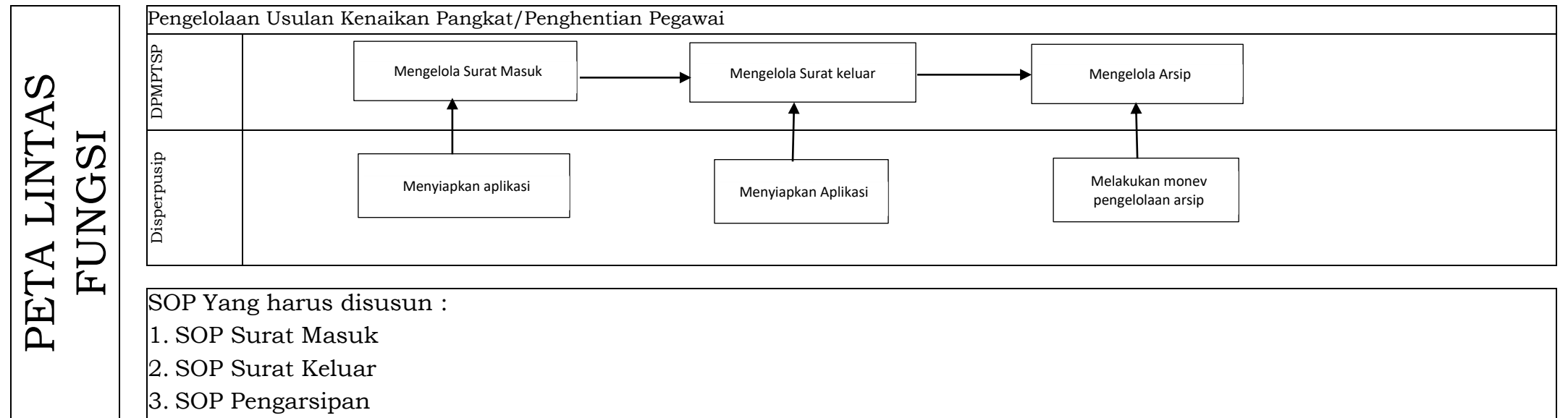
| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|-------------------------------------|----|
| 1 | Membuat Surat Konsultasi/Perjalanan Dinas | Setda | Surat Konsultasi | |
| 2 | Menyusun Laporan Konsultasi/ Perjalanan Dinas | Setda | Laporan Konsultasi/Perjalanan Dinas | |



Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|------------------------|--------------------|----------------------|----|
| 1 | Mengelola Surat Masuk | Disperpusip | Dokumen Surat Masuk | |
| 2 | Mengelola Surat keluar | Disperpusip | Dokumen Surat Keluar | |
| 3 | Mengelola Arsip | Disperpusip | | |



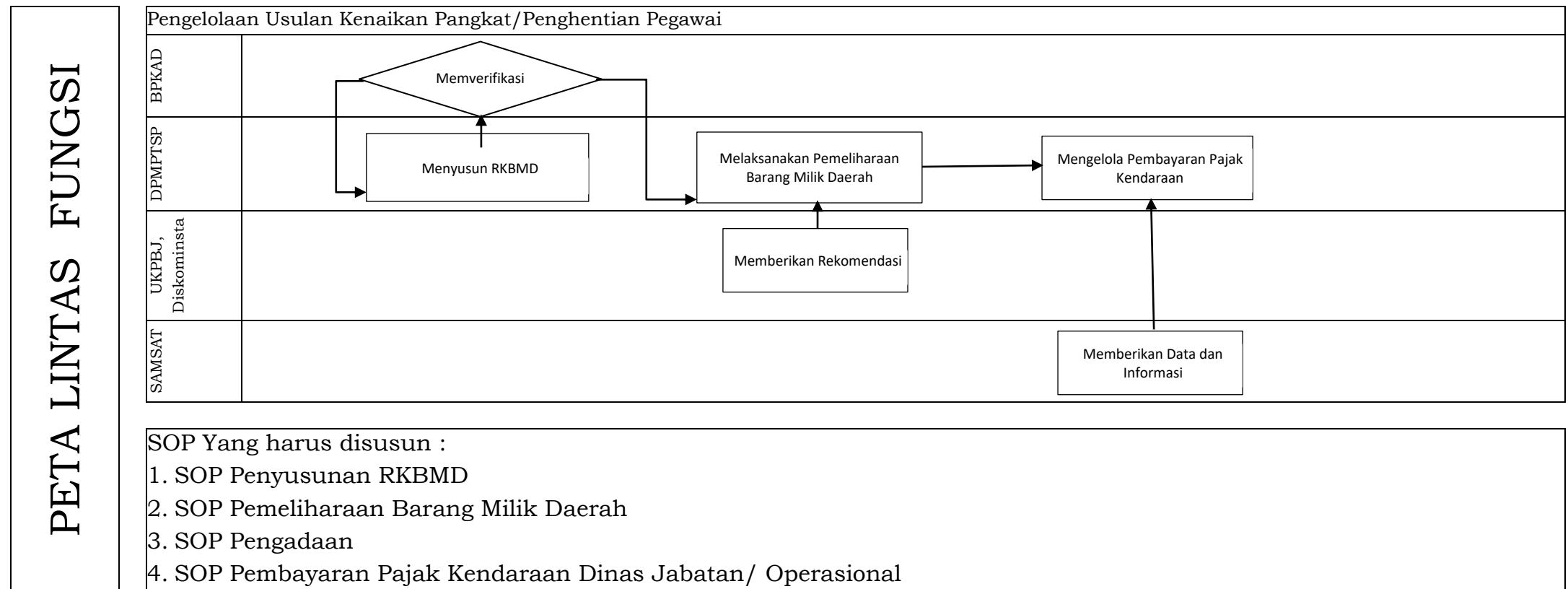
Proses : MGG.DPMPTSP.03 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

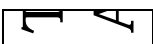
Sub Proses : MGG.DPMPTSP.03.01 Peningkatan Penunjang urusan Perangkat Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.06.01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

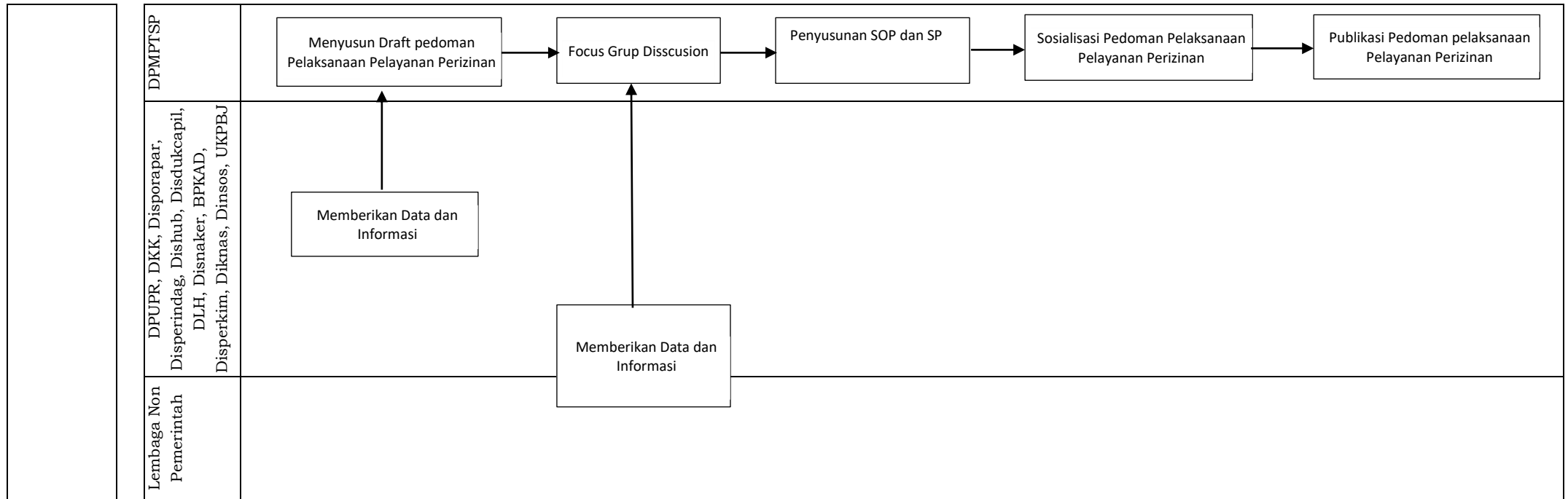
| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--------------------|--------------------------|----|
| 1 | Menyusun RKBMD | BPKAD | Dokumen RKBMD | |
| 2 | Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | UKPBJ, Diskominsta | Dokumen Pemeliharaan BMD | |
| 3 | Mengelola Pembayaran Pajak Kendaraan | SAMSAT | Dokumen Pajak Kendaraan | |



**AS FUNGSI (LEVEL 4)**

- Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
- Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.01 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan pelayanan Perizinan

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|--|--|------------------|---------|
| 1 | Menyusun Draft pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan | DPUPR, DKK, Disporapar, Disperindag, Dishub, Disdukcapil, DLH, Disnaker, BPKAD, Disperkim, Diknas, Dinsos, UKPBJ | Draft SP dan SOP | DPMPTSP |
| 2 | Focus Grup Discussion | DPUPR, DKK, Disporapar, Disperindag, Dishub, Disdukcapil, DLH, Disnaker, BPKAD, Disperkim, Diknas, Dinsos, UKPBJ, Lembaga Non Pemerintah | Berita Acara | |
| 3 | Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan | | SOP dan SP | |
| 4 | Publikasi Pedoman pelaksanaan Pelayanan Perizinan | | | |



SOP Yang harus disusun :

1. SOP Bahan Penyusunan SOP dan SP
2. SOP FGD SOP dan SP
3. SOP Penyusunan SOP dan SP
4. SOP Sosialisasi SOP dan SP
5. SOP Publikasi Data dan Informasi Secara Elektronik

LINTAS

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

BKPM,
Kementrian
PUPR,
Kemenkes,
kementrian
ATR

Kebijakan

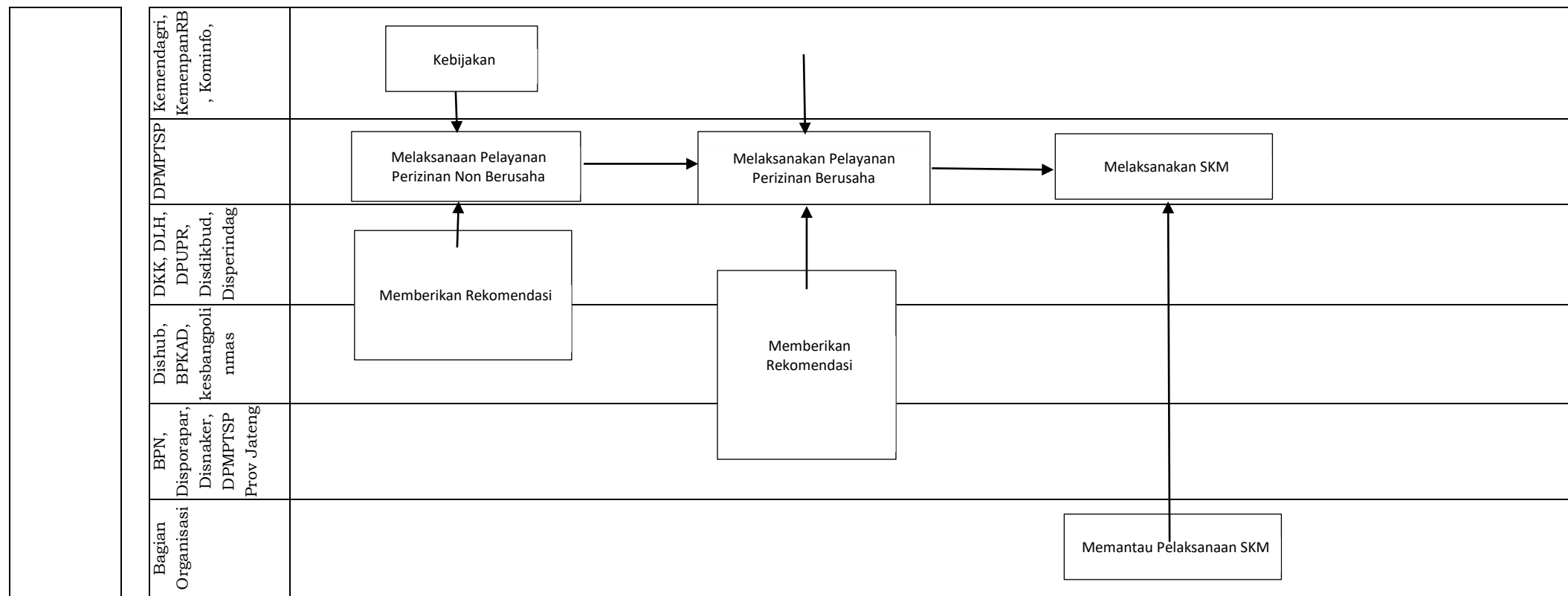
Proses
Sub
Proses
L

intas Fungsi: MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|--|-------------------------|---------|
| 1 | Melaksanakan Pelayanan Perizinan Non Berusaha | Kemendagri, KemenpanRB, Kominfo, DKK, Dishub, DLH, Disdikbud, Kesbangpolinmas, DPUPR, Disperindag, BPKAD | Izin | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha | BKPM, Kementrian PUPR, Kemenkes, Kementrian ATR, KemenpanRB, Kemendagri, Kominfo, DPMPTSP Prov Jateng, Disperindag, DKK, BPN, Disporapar, Disdikbud, DPUPR, DLH, Disnaker, Dispertan | Sertifikat Standar Izin | |
| 3 | Melaksanakan SKM | Bagian Organisasi | | |



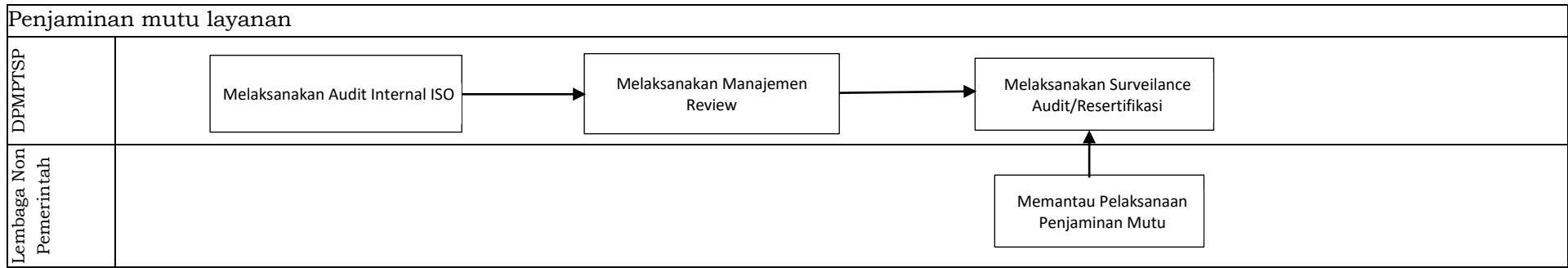
SOP Yang harus disusun :

1. SOP Antrian
2. SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha
3. SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha
4. SOP Pelayanan Keliling
5. SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
6. SOP SKM

Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.03 Penjaminan mutu layanan

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|------------------------|---|---------|
| 1 | Melaksanakan Audit Internal | | Laporan hasil Audit Internal | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Manajemen Review | | Laporan Manajemen Review | |
| 3 | Melaksanakan Surveillance Audit/Resertifikasi | Lembaga Non Pemerintah | Laporan Surveillance Audit/ Sertifikasi ISO | |

PETA LINTAS FUNGSI

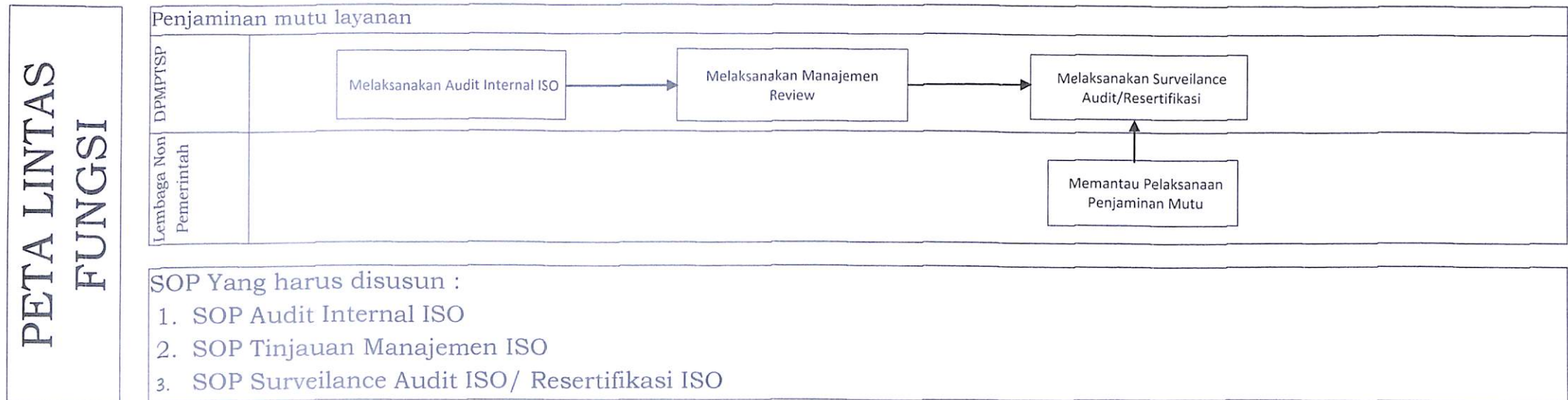


- SOP Yang harus disusun :
1. SOP Audit Internal ISO
 2. SOP Tinjauan Manajemen ISO
 3. SOP Surveillance Audit ISO/ Resertifikasi ISO

KHUDH OIFAH

Proses : MGG.DPMPTSP.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 Sub Proses : MGG.DPMPTSP.01.01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 Lintas Fungsi : MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.03 Penjaminan mutu layanan

| No | Kegiatan | Unit Kerja Terkait | Output | PJ |
|----|---|------------------------|---|---------|
| 1 | Melaksanakan Audit Internal | | Laporan hasil Audit Internal | DPMPTSP |
| 2 | Melaksanakan Manajemen Review | | Laporan Manajemen Review | |
| 3 | Melaksanakan Surveillance Audit/Resertifikasi | Lembaga Non Pemerintah | Laporan Surveillance Audit/ Sertifikasi ISO | |



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAGELANG


 KHUDHOIFAH